

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

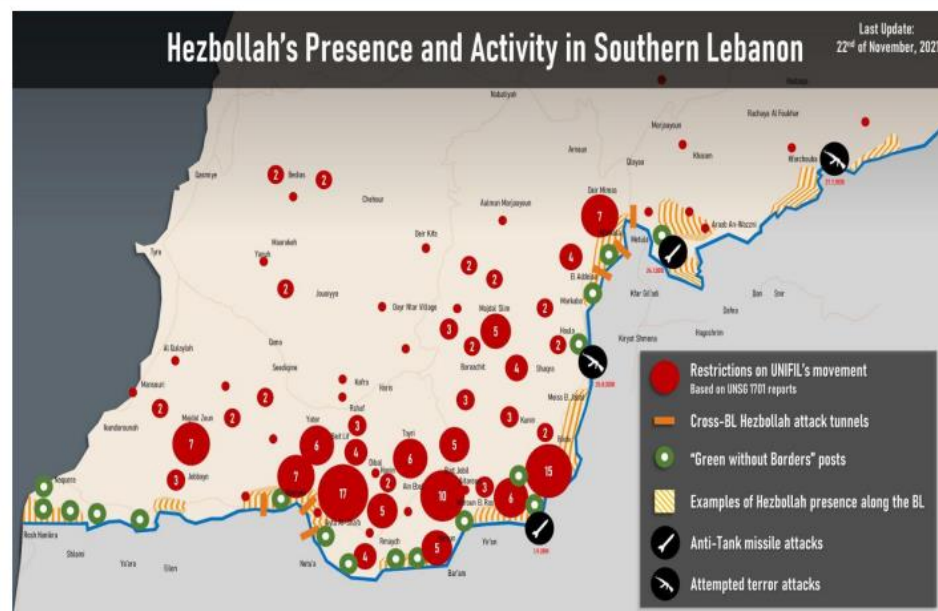
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Kondisi umum konflik Lebanon Selatan

Lebanon merupakan negara yang berada di wilayah Timur tengah dan berbatasan dengan Suriah juga Israel. Meskipun terletak di Timur Tengah, masyarakat Lebanon cukup terkenal dengan hidupnya yang modern. Sebab di Lebanon terdapat perpaduan dua kebudayaan Eropa dan Timur Tengah, hal itu dipengaruhi oleh Perancis yang pernah menjajah negara tersebut. Begitu pun dengan bahasa yang digunakan dalam pergaulan yaitu bahasa Arab dan bahasa Perancis. Berbeda dengan mayoritas negara-negara Arab lainnya, laki-laki atau perempuan Lebanon memiliki hak yang sama, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial lainnya. Hal itu membuat Lebanon dijuluki sebagai *Paris Van the East*. Dalam sistem politik, Lebanon menganut sistem politik konfensionalisme yang merupakan persebaran kekuasaan berdasarkan aliran agama. Aliran agama yang terdapat di Lebanon diantaranya Druze, Kristen Maronit, Sunni dan Syiah. Sayangnya keanekaragaman golongan yang ada di Lebanon sempat menjadi bumerang bagi kedaulatan negara tersebut, karena sempat terjadi perebutan kekuasaan antar golongan yang memicu konflik *Internal* di wilayah Lebanon pada tahun 1970-an.

Lebanese Civil War merupakan konflik pertama yang terjadi di Lebanon pada tahun 1975. Konflik tersebut disebabkan oleh perebutan kekuasaan politik di Lebanon, selain itu *Civil war* yang terjadi di Lebanon disinyalir terdapat campur tangan pihak *Eksternal* yaitu Israel, yang kerap kali melakukan invasi ke wilayah Lebanon. Israel memiliki alasan ingin membubarkan (Palestine Liberation Organisations) yang mengisi kamp

korban dari agresi yang dilakukan Israel di wilayah Palestina sehingga pada saat yang bersamaan sekitar tahun 1975 sampai 1990 Lebanon menghadapi konflik yang melibatkan pihak-pihak *Eksternal* maupun *Internal*.



Gambar 4.1 Keberadaan Aktivitas Hizbullah di Lebanon Selatan

Sumber : UN *Digital Library* <https://digitallibrary.un.org/record/3950013>

Sejak saat itu konflik di Lebanon terus berlarut terutama di wilayah Lebanon selatan yang terdapat kelompok masyarakat muslim bernama Hizbullah yang tidak terima terhadap perlakuan Israel mencampuri berbagai macam urusan Lebanon dan mengusik kehidupan masyarakat Lebanon. Atas hal tersebut, Hizbullah pun melakukan perlawanan terhadap Israel dengan mempersentajai anggotanya dengan kekuatan-kekuatan militer, sehingga Hizbullah menjadi kelompok milisi bersenjata yang bahkan dapat dikatakan memiliki kecanggihan persenjataan melebihi tentara nasional Lebanon atau LAF (*Lebanese Armed Forces*). Hizbullah merupakan kelompok masyarakat Lebanon selatan yang terhimpun dari berbagai macam kalangan diantaranya dari beberapa orang Syiah termasuk pemimpin mendatang dinas intelijen Hizbullah (Husayn al-Khalil) dan Dewan Jihad (Imad Mughniyah), mereka telah bergabung dengan

kelompok-kelompok Palestina sejak tahun 1969 (DeVore, 2012). Hingga saat ini Hizbullah mendapatkan perhatian dari sebagian masyarakat Lebanon karena banyak yang menganggap bahwa organisasi ini merupakan manifestasi dari trauma masyarakat Lebanon Selatan khususnya Beirut terhadap invasi yang pernah dilakukan oleh Israel. Terdapat tiga pilar yang menjadi dasar dari pergerakan Hizbullah diantaranya (Bar, 2006) :

- a. Percaya terhadap agama islam secara konprehensif, meliputi ibadah, peduli terhadap politik, ekonomi, memiliki tanggung jawab sosial dan berdakwah.
- b. Jihad atas nama Allah SWT (hanya untuk kepentingan agama dan tuhan bukan dalam urusan politik).
- c. Mentaati aturan hukum.

Hizbullah menjadi salah satu gerakan yang berfokus kepada kepentingan negaranya yaitu Lebanon khususnya untuk penganut Syiah di Lebanon Selatan. Disamping itu Iran menjadi salah satu negara yang memberikan dukungan secara riil terhadap perkembangan Hizbullah diantaranya dalam perkembangan kekuatan militer sehingga menghambat Israel untuk melakukan invasi ke Lebanon Selatan. Hassan Nasrullah merupakan Sekjen dan Pimpinan Pejuang Hizbullah, beliau merupakan tokoh sentral dari organisasi ini. Setelah meninggalnya pemimpin pertama Hizbullah yang dibunuh tentara Israel, mereka menganggap hal itu akan menghentikan semangat dari organisasi ini (Yulianto, 2010).

Kelompok ini berkembang semakin pesat didukung oleh keberhasilan Nasrullah membawa Hizbullah menjadi partai politik yang ikut serta pada pemilu Lebanon 1992 dan mampu menempatkan 8 wakilnya untuk menduduki Parlemen Lebanon (Musyaifudin A. , 2014). Seiring perkembangannya meski Hizbullah bukan merupakan satu-satunya partai Syiah yang ada di Lebanon, namun sikap Hizbullah yang memilih untuk

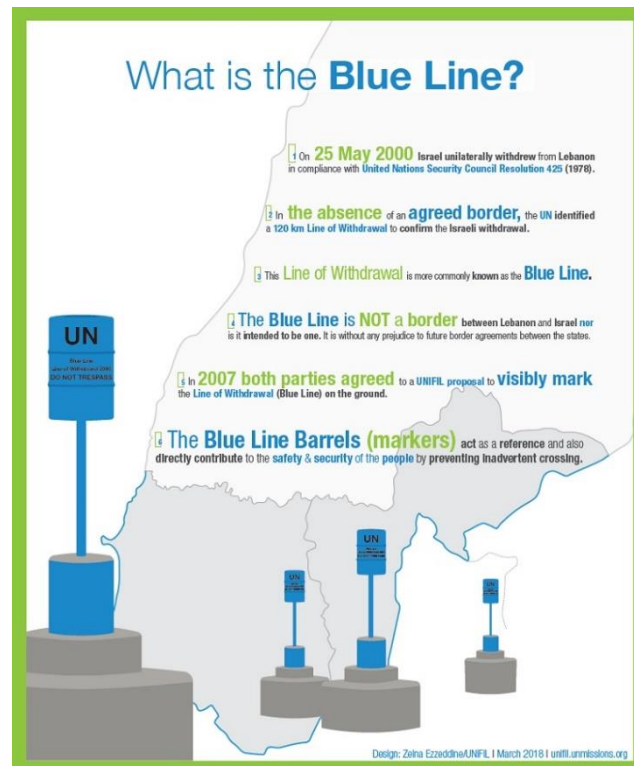
melawan keserakahan zionis Israel mendapat perhatian dari mayoritas warga Lebanon. Sejak saat itu masyarakat Lebanon khususnya yang tinggal di wilayah Lebanon selatan dan beragama Syiah sangat mendukung hal-hal yang berkaitan dengan Hizbullah, terlebih latar belakang Hizbullah melakukan perlawanan terhadap Israel dianggap telah mengancam kedaulatan Lebanon.

Meskipun PBB telah masuk dan mengerahkan operasi perdamaian yang telah dilakukan oleh pasukan perdamaian PBB ialah *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL). UNIFIL dibentuk oleh Dewan Keamanan pada Maret 1978 pasca terjadinya perang Lebanon (*Lebanese War*) antara *Israeli Defence Forces* (IDF) dan milisi Hizbullah, pada saat itu situasi damai di Lebanon belum tercapai sehingga konflik antara IDF dan milisi Hizbullah masih sering terjadi dan bereskalasi. Sampai akhirnya perang kembali terjadi pada tahun 2006 dan disebut sebagai *Second Lebanese War* (2006) atau perang 34 hari.

Dengan kondisi pasukan militer Lebanon belum memiliki kapasitas yang cukup kuat untuk mengamankan wilayahnya, pemerintah Lebanon meminta bantuan Dewan Keamanan untuk kembali mengaktifkan UNIFIL bertugas di wilayah Lebanon dengan mandate resolusi 1701 yang mengatur tentang upaya menciptakan gencatan senjata, penghentian aktivitas militer di wilayah perbatasan baik oleh Lebanon maupun Israel, melakukan perlucutan semua kelompok bersenjata di Lebanon (khususnya Hizbullah), dan memberikan penghargaan penuh terhadap *Blue Line* (UNSCR, 2006).

Blue Line merupakan garis yang membentang sepanjang wilayah teritorial Israel Utara dan Lebanon Selatan ditujukan sebagai batas kedua wilayah sebagai sarana untuk membantu menghindari pelanggaran dan penyeberangan yang tidak disengaja, dan dengan demikian membantu mengurangi ketegangan antara para pihak (UNIFIL, 2021b). Oleh karena itu konflik yang ada di wilayah Lebanon telah bergeser menjadi konflik langsung antara Israel dan Lebanon yang dalam hal ini di representasikan

oleh Hizbullah sebagai salah satu partai yang menampung aspirasi dari sebagian besar warga Lebanon. Sampai akhirnya terjadi puncak dari eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah yaitu perang selama 34 hari atau biasa di kenal sebagai *Second Lebanese War* pada bulan Juli tahun 2006.



Gambar 4.2 *Blue Line*

Sumber : <https://unifil.unmissions.org/unifil-operations>

Perang ini dipicu oleh diculiknya dua tentara Israel oleh Hizbullah di wilayah Shaba Lebanon Selatan yang geram kepada sikap refresif tentara Israel kepada masyarakat Lebanon (Yulianto, 2010). Dalam konflik tersebut, Hizbullah berhasil melumpuhkan tentara Israel. Sebab perang ini terjadi di wilayah yang secara geografis memberikan keuntungan bagi Hizbullah karena lebih memahami medan perang meskipun dari segi alutsista, Hizbullah masih kalah telak karena Israel memiliki berbagai teknologi persenjataan yang mutakhir. Keberhasilan itu juga di dukung oleh sosok pemimpin Hizbullah yaitu Hassan Nasrullah yang kerap kali memberikan keyakinan kepada warga Lebanon dan Syiah untuk membantu

dirinya memerangi Israel dan memperjuangkan kedaulatan bangsa. Hizbullah telah mempertahankan kemampuan militer konvensional dan non-konvensional yang kuat, yang ditunjukkannya dengan meluncurkan ribuan roket ke Israel dan menahan serangan balik Israel selama perang pada tahun 2006 (CRSReport, 2006).

Pasca *second Lebanese war*, UNIFIL menerapkan mandat resolusi 1701 yang didukung oleh mandat resolusi yang setiap tahunnya diperbaharui sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan. Hal itu masih berlanjut termasuk pada tahun 2021. Sayangnya pada setiap periode operasi masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap mandat resolusi 1701 yang menjadi mandat utama operasi perdamaian di Lebanon (UNSCR, 2020). Meskipun tidak ada pelanggaran yang bereskalasi menjadi konflik terbuka, namun pelanggaran-pelanggaran tersebut akan menjadi penghambat upaya proses perdamaian antara para pihak yang dilakukan oleh PBB melalui UNIFIL.

4.1.2 Resolusi 1701 (2006)

Konflik di Lebanon Selatan dapat dikategorikan sebagai konflik yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu Dewan Keamanan PBB bertanggung jawab untuk menentukan sifat konflik atau situasi berdasarkan Pasal 34 Piagam PBB yang akan memutuskan apakah PBB perlu mengambil langkah lebih serius jika konflik berkelanjutan terjadi. Secara konseptual pengiriman pasukan perdamaian ke daerah konflik di dasari oleh dua hal, pada situasi damai positive yang dilakukan ialah *Security Sector Reform* (SSR) sedangkan pada situasi damai negative yaitu dengan melakukan *Disarmament Demobilization dan Reintegration* (DDR).

Di dalam mandat resolusi 1701 (UNSC, 2006b) terdapat mandat yang harus dijalankan dan menjadi pedoman beroperasinya UNIFIL, mandat resolusi tersebut berisi :

- a. Memantau penghentian permusuhan;
- b. Mendampingi dan mendukung Angkatan Bersenjata Lebanon saat mereka ditempatkan di seluruh selatan Lebanon, termasuk di sepanjang *Blue Line*, saat Israel menarik militernya dari Lebanon;
- c. Mengkoordinasikan kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam paragraf sebelumnya (di atas) dengan Pemerintah Lebanon dan Israel;
- d. Memperluas bantuannya untuk memastikan akses kemanusiaan ke penduduk sipil dan pemulangan orang-orang yang dipindahkan secara sukarela dan aman;
- e. Membantu Angkatan Bersenjata Lebanon dalam pembentukan antara *Blue Line* dan Sungai Litani suatu wilayah yang bebas dari personel bersenjata, aset, dan senjata apa pun kecuali milik Pemerintah Lebanon dan UNIFIL;
- f. Membantu Pemerintah Lebanon, atas permintaannya, dalam mengamankan perbatasannya dan titik masuk lainnya untuk mencegah masuknya senjata atau benda lain yang terkait secara ilegal ke Lebanon.

Melalui mandat resolusi 1701, Dewan keamanan memberikan wewenang kepada UNIFIL untuk mengambil berbagai tindakan yang diperlukan di area operasi yang sesuai dengan kemampuannya, untuk memastikan tidak adanya aktivitas permusuhan dalam bentuk apa pun di area operasi. UNIFIL juga harus menghentikan upaya-upaya yang mencegah UNIFIL menjalankan mandat operasi di bawah mandat Dewan Keamanan. Selain itu, UNIFIL juga bertanggung jawab untuk melindungi personel, fasilitas, instalasi dan peralatan PBB, memastikan keamanan dan kebebasan bergerak personel PBB, bantuan kemanusiaan dan, tanpa mengurangi tanggung jawab utama Pemerintah Lebanon, yaitu membantu

melindungi warga sipil di bawah ancaman kekerasan fisik yang mungkin terjadi (UNIFIL, UNIFIL Presskit, 2019).

Pada pertengahan tahun 2000, salah satu upaya PBB melakukan penarikan pasukan asing dari wilayah Lebanon ialah dengan dibuatnya wilayah penarikan pasukan, yang dimanifestasikan menjadi sebuah garis yang membentang sepanjang 120 km dan tersebar menjadi 198 titik koordinat di wilayah Lebanon. Terlepas dari pro kontra yang datang baik dari Israel maupun Lebanon, kedua belah pihak telah berkomitmen untuk menghormati Garis Penarikan secara keseluruhan, seperti yang telah ditentukan oleh PBB. Hingga pada pertengahan tahun 2007, UNIFIL Bersama kedua belah pihak memulai untuk menandai Garis Penarikan di lapangan. Dengan alasannya untuk menghindari pelanggaran dan penyeberangan yang tidak disengaja, dan agar membantu mengurangi ketegangan di antara para pihak. Kedua belah pihak juga telah menerima UNIFIL sebagai satu-satunya penjaga garis penarikan tersebut yang selanjutnya dinamai dengan *Blue Line*. Pada awal tahun 2018 UNIFIL telah berhasil membangun 271 penanda pada *Blue Line* dari 540 titik yang di rencanakan, di mana pada setiap titik lokasi pembangunan penanda *Blue Line* telah disetujui oleh kedua belah pihak (UNIFIL, UNIFIL Presskit, 2019).

Penarikan *Blue Line* tersebut menjadi penanda wilayah operasi UNIFIL yang terbentang sepanjang *Blue Line* di selatan sampai sungai Litani di utara dan terbagi menjadi dua sector barat dan timur sedangkan *headquarter* dari UNIFIL terletak di Naqoura. Pasukan UNIFIL telah beroperasi diberbagai sector wilayah strategis Lebanon untuk membantu LAF dalam rangka pemenuhan kebutuhan bantuan angkatan bersenjata Lebanon. Pada 31 Desember 2021, pasukan UNIFIL terdiri dari 10.048 pasukan penjagaan perdamaian dari 46 negara penyumbang pasukan perdamaian (UNIFIL, 2021). Kegiatan operasi yang dilakukan oleh UNIFIL meliputi patroli kendaraan dan jalan kaki siang dan malam, mendirikan pos pengamatan dan pos pemeriksaan, melakukan *counter-rocket launching*

operations (CRLOs), kegiatan pemantauan khususnya di sepanjang *Blue Line* dan sekitarnya, serta melakukan pembersihan persenjataan dan ranjau yang belum meledak. Selain itu, UNIFIL dan LAF melakukan berbagai latihan dan pelatihan bersama untuk lebih memperkuat koordinasi taktis dan operasional serta efektivitas kegiatan bersama di wilayah operasi.

UNIFIL telah menjalin hubungan bilateral dengan kedua belah pihak di berbagai tingkatan melalui forum Tripartit yang berkaitan dengan implementasi resolusi 1701 (2006), yang melibatkan hubungan dengan tingkat paling tinggi, dan strategis termasuk panglima Angkatan dengan jenderal LAF dan IDF yang telah ditunjuk (UNIFIL, UNIFIL Presskit, 2019). Seiring berjalannya waktu, forum berkembang dan diperluas untuk menangani pelanggaran resolusi 1701 (2006) serta untuk mengidentifikasi penanganan isu keamanan dan operasional militer. Pada level ini UNIFIL berfungsi sebagai mekanisme penting untuk komunikasi dengan para pihak serta untuk mengurangi ketegangan dan memperkuat penghentian permusuhan dan telah terbukti menjadi mekanisme yang efektif untuk mengelola konflik, menjaga ketegangan dan membangun kepercayaan antara kedua belah pihak.

Pada 2017, Dewan Keamanan melakukan tinjauan strategis UNIFIL yang mendorong LAF dan UNIFIL untuk mempelajari lebih lanjut dan mengembangkan kemungkinan pembentukan unit model yang didedikasikan untuk beroperasi di Sektor Litani selatan yang merupakan area operasi UNIFIL (UNSCR, 2020). Hal ini dilakukan sebagai langkah konkret menuju peningkatan kapasitas LAF pada implementasi resolusi 1701 (2006). Hal itu ditujukan untuk memperkuat kemampuan dan kesiapan operasional LAF di selatan sungai Litani, dengan tujuan untuk memperdalam kerja sama antara LAF dan UNIFIL melalui kehadiran dan upaya bersama, menghormati *Blue Line*, juga mempertahankan wilayah dari semua angkatan bersenjata, aset dan senjata selain milik Pemerintah Lebanon dan UNIFIL. UNIFIL melakukan kegiatan operasional

pembersihan ranjau dengan dukungan dari *UN Mine Action Service* (UNMAS) untuk mendukung mobilitas aset UNIFIL yang dapat berdampak buruk pada pergerakan dan keamanan personel UNIFIL dan koordinasi untuk penyuluhan kesadaran risiko kepada masyarakat lokal (UNIFIL, UNIFIL Presskit, 2019).

Mekanisme utama yang digunakan oleh UNIFIL untuk berinteraksi dengan penduduk lokal di Lebanon selatan ialah *Civil Affairs (civilian) and Civil-Military Coordination (military)* (UNIFIL, UNIFIL Presskit, 2019). Personel UNIFIL memainkan peran penting dalam berhubungan dengan pemerintah dan penduduk lokal serta melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung penduduk di area yang menjadi tanggung jawab UNIFIL. Meskipun UNIFIL bukan merupakan Lembaga kemanusiaan, namun UNIFIL juga memberikan berbagai layanan dasar kepada masyarakat dengan menggunakan keterampilan dan keahlian teknis dari pasukan UNIFIL, dan sumber daya operasional lainnya untuk membantu penduduk setempat. Diantaranya yaitu Kontingen UNIFIL memberikan bantuan medis, dokter gigi, kedokteran hewan, dan bantuan lainnya secara gratis. Selain itu, kontingen UNIFIL mengadakan program pelatihan bagi masyarakat di bidang komputer, bahasa, pembuatan roti, merajut, yoga, dan taekwondo.

UNIFIL juga menjalankan berbagai kegiatan cepat tanggap yang melibatkan kerjasama sipil-militer untuk mendukung perluasan otoritas LAF di bidang operasi dan untuk membantu pemerintah Lebanon dalam menangani berbagai kebutuhan penduduk yang mendesak. UNIFIL sangat mengutamakan hubungan dengan komunitas penduduk di area operasi, untuk itu UNIFIL berinteraksi dengan komunitas secara teratur pada berbagai tingkatan. Terdapat beberapa aspek yang disampaikan oleh UNIFIL dalam hubungan ini, diantaranya : menginformasikan kepada masyarakat tentang mandat dan kegiatan UNIFIL; memberikan atau memfasilitasi tingkat bantuan yang terbatas; menghormati dan berbagi

budaya, adat istiadat; berpartisipasi dalam acara komunitas dan memastikan tidak adanya gangguan terhadap keberlangsungan kehidupan sehari-hari penduduk lokal yang diakibatkan oleh operasi UNIFIL di area tersebut (UNIFIL, UNIFIL Presskit, 2019).

Selain mandat 1701, UNIFIL diberikan mandat tambahan setiap tahunnya untuk memaksimalkan tugas operasi yang disesuaikan dengan ancaman-ancaman yang akan dihadapi pada tahun tersebut. Salah satunya seperti dalam resolusi 2373 (2017), yang memperpanjang mandat UNIFIL hingga Agustus 2018, Dewan Keamanan menyerukan pengerahan Angkatan Bersenjata Lebanon yang “*accelerated*” dan “*durable*” di Lebanon selatan dan perairan teritorial Lebanon, dalam upaya meningkatkan dukungan dan koordinasi dengan Angkatan Bersenjata Lebanon. Oleh sebab itu, atas permintaan Pemerintah Lebanon, mandat UNIFIL diperbarui setiap tahun oleh Dewan Keamanan, dengan tetap menjadikan resolusi 1701 sebagai mandat utama operasi UNIFIL. Sejak saat itu, Dewan Keamanan memuji UNIFIL atas perubahan operasional yang dilakukan sebagai tanggapan terhadap resolusi 2373 (2017) dan 2433 (2018) dan menyerukan peningkatan kegiatan operasional yang berkelanjutan di masa mendatang (UNIFIL, UNIFIL Presskit, 2019).

4.1.3 Peran Kontingen Garuda TNI UNIFIL

Misi pemeliharaan perdamaian (*Peacekeeping Operations*) merupakan konsep yang diperkenalkan pada tahun 1950-an oleh seorang mantan sekretaris jenderal PBB Dag Hammarskjold (IIS dan PMPP TNI, 2013). Misi tersebut bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia yang menjadi tanggung jawab bersama dan merupakan instrument bagi komunitas internasional untuk turut serta dalam upaya menciptakannya. Dalam menjalankan sebuah misi pemeliharaan perdamaian terdapat tugas utama yaitu menjaga perdamaian dan membangun perdamaian atau yang dikenal dengan *peacekeeping* dan

peacebuilding. Umumnya kesuksesan dari misi pemeliharaan perdamaian dapat dilihat dari tercapainya mandat resolusi misi perdamaian yang sudah terlaksana dengan sempurna dan membaiknya stabilitas keamanan di wilayah negara berkonflik.

Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang cukup aktif terlibat forum-forum internasional khususnya yang berkaitan dengan upaya menciptakan perdamaian dunia. Indonesia pertama kali mengirimkan pasukan perdamaian ke misi pemeliharaan perdamaian PBB ialah pada tahun 1957 pada konflik yang terjadi di terusan Suez melalui misi UNEF-1 (IIS dan PMPP TNI, 2013). Pada misi tersebut Indonesia membentuk kontingen Garuda I yang merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia yang sejak saat itu menjadi *pioneer* atas komitmen Indonesia untuk terlibat aktif dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB di seluruh dunia. Keterlibatan Indonesia pada operasi perdamaian yang aktif dilatar belakangi oleh sejalanannya tujuan misi perdamaian dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Peran aktif yang dilakukan oleh Indonesia juga didukung oleh kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, artinya bebas menentukan arah sikap politik serta pandangan politik dan senantiasa aktif dalam membantu menjaga perdamaian dunia agar terciptanya ketertiban dunia.

Pada operasi perdamaian UNIFIL, Indonesia pertama kali bergabung ke Lebanon pada tahun 2006 melalui kontingen Garuda XXIII-A (United Nations, 2021a). Kontingen Garuda UNIFIL merupakan pasukan perdamaian terakhir yang dikirimkan oleh Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian dunia, dan pada saat itu Kontingen Garuda mengirimkan 1.456 personel yang menjadi pengiriman Kontingen Garuda dengan jumlah terbanyak yang pernah dikirimkan oleh Indonesia pada sebuah misi pemeliharaan perdamaian yang diikuti (Mulyana, 2013). Setiap

tahunnya Indonesia terus meningkatkan jumlah pengiriman pasukan dan meningkatkan kapabilitas dari pasukannya pada setiap misi pemeliharaan perdamaian PBB. Peningkatan tersebut dicerminkan dengan dibentuknya sebuah organisasi untuk menangani dan mempersiapkan pasukan melalui Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), pada 29 Januari 2007. Pembentukan PMPP TNI berada dibawah payung hukum Pembukaan UUD 1945 Alinea I dan IV, Undang-undang RI No.34 Tahun 2004 tentang TNI, dan Keputusan Panglima Nomor Kep/4/I/2007. Organisasi PMPP TNI diperkuat dengan dibentuknya instansi yang berada di bawah Peraturan Panglima Nomor Perpang/91/XI/2011 tanggal 16 November 2011 untuk menegaskan segala aspek yang berhubungan dengan kebutuhan persiapan misi pemeliharaan perdamaian (TNI, 2013).

Keberadaan PMPP TNI membuktikan bahwa pengiriman Kontingen Garuda merupakan hal yang signifikan dan dibutuhkan oleh PBB pada setiap misi pemeliharaan perdamaian ditinjau dari jumlah pasukan dan keberhasilan yang dapat ditunjukkan oleh Kontingen Garuda pada setiap misi pemeliharaan perdamaian. Hal itu didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (Rachmat, 2016). Dan Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 5 tahun 2015 tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemelihara Perdamaian 2015 – 2019 acuan strategis yang disusun oleh Menteri selaku Ketua Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian bagi Kementerian (Kemlu, 2019). Keterlibatan Indonesia yang aktif dalam setiap misi perdamaian merupakan bentuk dari diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia. Serta Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian dengan mempertimbangkan (huruf b) untuk meningkatkan partisipasi Pemerintah Republik Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian, diperlukan kesiapan personel,

materiil, peralatan, dan dana guna memenuhi permintaan partisipasi tersebut secara cepat dan tepat (Sumertha, Malik & Assidik, 2016).

Indonesia merupakan salah satu *Troops Contributing Countries* yang selalu terlibat pada misi pemeliharaan perdamaian UNIFIL, yang menyiratkan bahwa Indonesia selalu mengirimkan kontingen Garuda ke misi pemeliharaan perdamaian UNIFIL, dan hal tersebut merupakan pencapaian yang positif sebab Indonesia dipercaya oleh komunitas internasional dan pihak-pihak yang bertikai atas kapasitas dan kapabilitasnya untuk menjadi penyumbang pasukan terbanyak dalam misi tersebut. Kontingen Garuda dinilai memiliki kepekaan sosial yang tinggi dalam menjalankan tugas, sebab kontingen Garuda bukan hanya berfokus kepada resolusi 1701 yang menjadi operasi mereka di wilayah Lebanon selatan namun kontingen Garuda mampu memodifikasi cara penerapan mandat resolusi tersebut guna mempermudah tugas operasi yang mereka lakukan. Bahkan sekretaris jenderal PBB Ban Ki Moon pernah menyampaikan apresiasi atas kinerja baik yang dilakukan oleh kontingen Garuda (IIS dan PMPP TNI, 2013).

Keberhasilan Kontingen Garuda/UNIFIL yang telah mengamankan wilayah *Blue Line* dan mampu mencegah kontak senjata antara tentara Israel dan Lebanon di wilayah perbatasan, mendapatkan apresiasi dari UNIFIL karena bila bentrokan tersebut terjadi maka akan sangat merugikan proses perdamaian yang telah terbangun di wilayah Lebanon Selatan. Kontingen Garuda mampu menciptakan stabilitas di area operasi yang menjadi tanggung jawab dalam misi pemeliharaan perdamaian UNIFIL. Keberhasilan kontingen Garuda dalam berbaur dengan penduduk lokal Lebanon selatan salah satunya dengan membawa budaya “ketimuran” yang dimiliki oleh Indonesia. Sehingga selain bertugas di bawah payung Dewan Keamanan PBB, Kontingen Garuda mampu memanfaatkan misi pemeliharaan perdamaian di Lebanon selatan sebagai media untuk menjalankan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan

menciptakan perdamaian serta keamanan di wilayah konflik sesuai dengan pembukaan UUD 1945.

Kontingen garuda dapat dikatakan sebagai duta bangsa Indonesia dengan menunjukkan citra cemerlang pada misi pemeliharaan perdamaian UNIFIL. Kontingen garuda telah melakukan berbagai pendekatan guna menciptakan stabilitas wilayah konflik, salah satunya dengan mengedepankan metode *people to people contact* yang merupakan salah satu metode diplomasi publik (Rachmat, 2016). Dan hal tersebut mampu menjadi jembatan komunikasi antar masyarakat dan individu untuk lebih di terima oleh suatu komunitas dalam hal ini kontingen garuda UNIFIL sangat diterima oleh penduduk lokal Lebanon selatan. Selain itu, cara yang dilakukan oleh kontingen garuda dalam mendekati diri dengan penduduk lokal di wilayah konflik ialah dengan memperkenalkan budaya Indonesia kepada penduduk di wilayah Lebanon secara khusus dan kepada kontingen UNIFIL lain secara umum.

Kontingen garuda umumnya bersikap ramah terhadap masyarakat dan diterima oleh mereka. Satu contoh adalah saat anggota kontingen garuda melewati perkampungan di sekitar markas, atau pos jaga LAF, mereka menyapa dengan meneriakkan, '*Garuda*', yang merupakan jargon kontingen Indonesia. Contoh lain adalah saat salah satu tokoh masyarakat melaksanakan pesta perkawinan putrinya, para prajurit kontingen garuda turut diundang dan berpartisipasi dalam tarian-tarian lokal yang mengiringi upacara perkawinan tersebut, suatu hal yang menurut seorang perwira kontingen garuda tidak dapat diikuti oleh kebanyakan prajurit perdamaian dari negara lain. Kontingen garuda juga mampu memperkenalkan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat Indonesia dalam setiap perilaku dan sikap kontingen garuda sehari-hari dalam menjalankan misi diantaranya sopan santun, ramah tamah, gotong royong dan senyum sapa salam (Hidayat, 2012).

Kontingen garuda memiliki kemampuan non-teknis yang meliputi aspek personalitas yang mampu menunjang performa kontingen garuda dalam menjalankan misi pemeliharaan perdamaian. Hal ini diwujudkan dalam hubungan *Civil-Military Cooperation* (CIMIC) yang dilakukan oleh kontingen garuda dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian, sebab selain menjalankan tugas dan fungsi sebagai pasukan pemeliharaan perdamaian, kontingen garuda juga mampu menyisipkan misi kebudayaan perdamaian dengan memperkenalkan berbagai kesenian tradisional Indonesia kepada masyarakat di Lebanon Selatan maupun kepada sesama kontingen UNIFIL yang berasal dari negara lain. Salah satunya dengan menggelar acara "Indonesia Night" dengan memperkenalkan berbagai budaya khas Indonesia seperti penggunaan baju batik, dan menampilkan tari-tarian daerah Indonesia. Pengenalan kebudayaan Indonesia tersebut merupakan upaya Indonesia untuk mendekatkan dengan sesama kontingen juga penduduk lokal Lebanon selatan (Rachmat, 2016).

Kontingen garuda menggunakan *Smart Car* untuk berinteraksi dengan penduduk Lebanon di wilayah operasi kontingen garuda (IIS dan PMPP TNI, 2013). Mobil pintar tersebut menyediakan buku-buku dengan berbagai macam Bahasa, alat peraga edukasi, serta film-film yang memperkenalkan Indonesia menjadi salah satu kegiatan yang sering dilakukan kontingen garuda untuk mendekatkan diri dengan penduduk lokal. Kontingen garuda telah mampu melakukan upaya peacebuilding yang merupakan salah satu tugas pasukan UNIFIL dalam rangka rekonstruksi wilayah paska konflik untuk membangun Kembali sarana dan prasarana public dengan melibatkan penduduk lokal Lebanon dengan metode gotong-royong. Disamping itu, mayoritas penduduk lokal Lebanon selatan yang beragama islam juga dimanfaatkan dengan baik oleh kontingen garuda yang juga Sebagian besar beragama islam. Kontingen garuda kerap kali mengajak penduduk lokal untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan bersama di wilayah operasi (Rachmat, 2016). Atas hal itu penduduk lokal

pun mengapresiasi hal-hal yang telah dilakukan oleh kontingen garuda dan menerima keberadaan kontingen garuda di wilayahnya, tak jarang kontingen garuda kerap kali mendapatkan undangan untuk hadir dan terlibat di berbagai kegiatan yang diadakan oleh penduduk lokal Lebanon.

Pada tahun 2011, Indonesia berkontribusi secara optimal dengan mengirimkan 1.445 personel yang memiliki kualitas profesionalisme yang tinggi. Hal itu menghasilkan adanya perluasan area operasi yang diberikan oleh PBB kepada Satgas Indobatt kontingen garuda XXIII-E/UNIFIL, perluasan area operasi ini meliputi alih wilayah yang sebelumnya tanggung jawab batalyon Prancis menjadi tanggung jawab area operasi kontingen garuda (Indobatt) (IIS dan PMPP TNI, 2013). Hingga saat ini, setiap tahunnya Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan Kontingen garuda agar dapat bekerja lebih baik pada setiap misi pemeliharaan perdamaian PBB. Upaya tersebut ditinjau dari adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas untuk menunjang kemampuan teknis dan non-teknis pasukan di wilayah operasi.

4.2 Hasil Pengumpulan Data

4.2.1 Penerapan mandat resolusi 1701 (2006) tahun 2021

4.2.1.1 Periode I (Februari – Juni)

Pada periode I tahun 2021, Dewan Keamanan terus memantau pelaksanaan mandat resolusi 1701 (2006) yang dilakukan oleh UNIFIL melalui mandat operasi pada tahun sebelumnya yaitu resolusi 2539 (2020). Dalam mandat operasi tersebut Dewan Keamanan kembali mengingatkan paragraf 15 dari resolusi 1701 (2006) yang menjelaskan tentang tanggung jawab para pihak untuk melakukan segala upaya demi mencegah maupun menghentikan terjadinya penjualan atau penyediaan senjata dan materi terkait kepada entitas atau individu mana pun di Lebanon selain atas izin atau keperluan dari Pemerintah Lebanon dan UNIFIL.

Dalam hal ini PBB tetap berkomitmen untuk mendukung kepatuhan dan menghentikan pelanggaran juga menghindari eskalasi untuk mencapai tujuan bersama yaitu perdamaian di Kawasan Lebanon selatan dan implementasi penuh resolusi 1701 (2006). Melalui resolusi 2539 (2020), Dewan Keamanan juga meminta Pemerintah Lebanon untuk memfasilitasi akses kepada UNIFIL di setiap area operasi sesuai dengan resolusi 1701 (2006), dengan tetap menghormati kedaulatan Lebanon.

Wakil penasihat militer PTRI New York, Letnan Kolonel (Sus) Martua Leonardo Sitorus dalam wawancara bersama peneliti melalui zoom meeting pada 13 November 2021 bahwa,

“Penanganan konflik melalui mandat resolusi 1701 merupakan topik yang menarik karena resolusi tersebut telah di keluarkan sejak tahun 2006, namun hingga saat ini pasukan perdamaian masih bersiaga di wilayah Lebanon dengan setiap tahunnya diberi resolusi tambahan untuk menugaskan pasukan perdamaian berbagai negara bergabung dengan UNIFIL.”

Hal itu didukung oleh penuturan dari Komandan Kontingen Garuda UNIFIL 2021, Kol. Inf Amril Haris Isya Siregar, dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti melalui zoom meeting pada 21 Desember 2021 mengenai situasi di area operasi pada periode ini bahwa,

“Secara umum memang peran yang dilakukan oleh UNIFIL sudah memenuhi poin-poin dari mandat resolusi, dan pada awal periode juga tidak terdapat ketegangan di antara para pihak. Hanya saja yang menjadi kendala utama dari implementasi penuh mandat 1701 (2006) ini lebih ke perilaku dari para pihak yaitu Israel dan Hizbullah, khususnya anggota Hizbullah yang saat ini sulit dibedakan dengan warga sipil Lebanon. Bahkan ada kontingen pasukan dari negara lain yang mengalami insiden penolakan dari warga setempat saat melakukan patroli di area operasinya. Tapi tidak sampai ada aksi kekerasan, hanya adanya insiden seperti jalanan untuk mobil patroli lewat itu di halangi kendaraan atau batu-batu

besar. Namun dari pasukan itu juga tidak bisa melakukan apa-apa, karena yang menghadang itu pakai pakaian warga sipil biasa, jadi pasukan UNIFIL nya tetap menghargai mereka. Hanya saja saat pasukan UNIFIL kekeh lewat biasanya di buntutin atau di hadang langsung dan kalau udah gitu dari UNIFIL biasa menghubungi LAF untuk patroli bersama. Kebanyakan yang mengalami insiden-insiden itu pasukan UNIFIL dari negara-negara barat, mungkin dianggap cenderung berpihak kepada Israel.

...

Kalau yang terkait aktifitas milisi bersenjata dari wilayah Lebanon ke Israel kebanyakan itu tidak ketauan, soalnya saat kita patroli mereka seperti masyarakat sipil saja, tiba-tiba saat sudah tidak ada pasukan UNIFIL mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Dan dari pihak Israel juga tetap sering melakukan pelanggaran dengan justifikasi Latihan militer atau membalas serangan yang datang dari wilayah Lebanon. Untungnya di periode ini tidak ada konflik terbuka, hanya sempat ada peningkatan eskalasi merespon situasi konflik antara Israel dan Palestina itu. Sempat ada demo besar-besaran di perbatasan wilayah Israel dan Lebanon selatan, karena di Lebanon kan banyak masyarakat Palestina yang selama ini mengungsi, selain itu juga memang masyarakat Lebanon khususnya yang beragama Muslim mereka merasa warga Palestina adalah saudara dekat mereka, dan Panjang juga kan sejarah hubungan antara negara-negara ini dari dulu. Karena prinsip yang di pegang teguh oleh kami pasukan UNIFIL itu adalah imparisial artinya tidak memihak kepada para pihak yang terlibat konflik, jadinya juga kita berhati-hati dalam bertindak supaya prinsip itu tetap terjaga. Ketika demonstrasi itu terjadi kita bantu mengawasi saja dan memastikan tidak ada korban jiwa di lapangan. Kembali lagi setelah insiden-insiden tersebut terjadi, kita menjadi penengah pertemuan mereka melalui forum tripartite, itu di level strategis harapannya kedua belah pihak bisa lebih menghargai dan ikut menerapkan secara penuh mandat mandat resolusi 1701 (2006).”

Penuturan yang diberikan oleh Kol. Amril dalam wawancara dengan peneliti didukung oleh dokumen resmi yang dirilis oleh Dewan Keamanan mengenai pelaporan Sekertaris Jenderal nomor S/2021/650 tentang *Implementation of Security Council resolution 1701 (2006) during the period from 20 February to 18 June 2021*.

Dari dokumen tersebut peneliti membagi data pelaporan menjadi tiga sub bagian, diantaranya sebagai berikut :

a. Situasi di area operasi

Secara umum pada periode ini situasi di area operasi UNIFIL, khususnya di sepanjang *Blue Line*, tetap tegang, yang disebabkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak dan diperparah dengan perkembangan situasi di Israel dan Wilayah Pendudukan Palestina. Terjadi bentrokan di sepanjang *Blue Line*, termasuk di dekat Marun al-Ra's, Marwahin, Udaysah dan Sarda (semua Sektor Timur). Dalam demonstrasi tersebut terdapat konvoi kendaraan yang diikuti simpatisan dan warga setempat sambil mengibarkan bendera Palestina, Lebanon dan Hizbullah di beberapa lokasi di sepanjang Garis Biru, termasuk di dekat Markaba, Udaysah, Kafr Kila dan Arab al-Wazzani (Sektor Timur). Mundurnya rezim pemerintahan Diab setelah ledakan yang terjadi di Pelabuhan dan kekosongan pemerintahan sejak belum disetujuinya Saad Hariri untuk membentuk pemerintahan baru yang berlangsung hampir satu tahun memperburuk situasi politik Lebanon. Sistem keuangan Ponzi yang diadopsi oleh Lebanon membuat negara ini kesulitan dan mengalami krisis ekonomi dan keuangan yang cukup parah di masa COVID-19. Situasi internal yang terjadi di Lebanon menjadi kendala dari upaya penerapan penuh resolusi 1701 (2006) yang dilakukan oleh UNIFIL. Dalam laporan periode ini tercatat bahwa tidak ada kemajuan yang signifikan dan LAF pun masih belum mampu menyelesaikan permasalahan sehubungan dengan perlucutan kelompok-kelompok bersenjata, terkait kepemilikan senjata yang berada di luar kendali Negara oleh Hizbullah dan kelompok lain yang

melanggar resolusi 1701 (2006). Dan tentu saja hal itu membatasi kemampuan Negara untuk menjalankan kedaulatan dan otoritas penuh atas wilayahnya.

b. Peran UNIFIL di area operasi

Pada periode ini, UNIFIL terdiri dari 10.401 personel militer, termasuk 686 wanita (7 persen), dari 46 negara penyumbang pasukan; 241 staf sipil internasional, termasuk 92 wanita (38 persen); dan 562 staf sipil nasional, termasuk 152 wanita (27 persen). Berdasarkan resolusi 2539 (2020), pada periode ini UNIFIL mempertahankan tempo operasional yang tinggi dan ditunjukkan dengan kehadiran UNIFIL di seluruh area operasi. UNIFIL melakukan rata-rata 14.022 kegiatan operasional militer bulanan, termasuk 6.555 patroli. Sekitar 5 persen dari kegiatan operasional militer melibatkan pasukan Wanita. Selain itu sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas area operasi yang membentang antara *Blue Line* dan Sungai Litani terbebas dari personel bersenjata, aset dan senjata yang tidak sah, UNIFIL, dalam setiap operasinya terus berkoordinasi bersama LAF dengan membuat 16 pos pemeriksaan permanen dan 122 pos pemeriksaan sementara. Selain melaksanakan mandat utamanya, secara parsial UNIFIL terus mendukung pelaksanaan resolusi 1325 (2000) tentang perempuan dan perdamaian serta keamanan. Hal ini ditunjukkan melalui pelatihan pengarusutamaan gender bagi 4.737 personel militer dan sipil UNIFIL, termasuk 247 wanita. Disamping itu UNIFIL juga membuat proyek cepat tanggap untuk meningkatkan peluang mata pencaharian berkelanjutan bagi perempuan dan menyediakan komputer untuk mendukung

sekolah online bagi anak perempuan yang kurang beruntung secara ekonomi kepada penduduk lokal di area operasi.

Sesuai dengan komitmen perlindungan warga sipil, UNIFIL berinisiatif melakukan *Action for Peacekeeping* dan strategi implementasinya *Action for Peacekeeping Plus*, melalui proyek-proyek jangka pendek, UNIFIL berinisiatif untuk mengembangkan kerjasama sipil-militer yang didanai oleh negara-negara penyumbang pasukan, hal itu dilakukan untuk terus memberikan peningkatan kapasitas dukungan kepada penduduk lokal dan Pemerintah Lebanon. Salah satunya seperti memberikan masukan kepada Polisi setempat untuk menerapkan sekitar 460 inisiatif kerja sama sipil-militer, termasuk sumbangan peralatan medis dan pelatihan tenaga medis, untuk mendukung upaya mencegah penularan COVID-19 di wilayah Lebanon. Pada periode ini UNIFIL telah membuka 6.718 m² lahan di area operasinya, UNIFIL juga melakukan patroli pengintaian udara di daerah-daerah yang akses patroli daratnya terbatas, termasuk ke dalam area milik warga yang terkontaminasi oleh sisa-sisa bahan peledak perang atau ranjau anti-personil dan berhasil membuang 948 ranjau anti-personil. Setelah adanya tiga insiden terkait ranjau yang terjadi di area operasi UNIFIL, yang melukai dua penggembala dan seorang penjinak ranjau. UNIFIL bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk melakukan pengarahan kesadaran risiko kepada penduduk lokal dan 66 personel militer UNIFIL, termasuk tujuh orang personel wanita.

Pada 2 Maret, Komite Palang Merah Internasional, berkoordinasi dengan UNIFIL, memfasilitasi kembalinya seorang warga negara Lebanon yang ditangkap pada tanggal

28 Februari oleh IDF setelah ia melintasi selatan *Blue Line*. Pada 21 Maret, UNIFIL mendengar sekitar 108 tembakan api dan lima ledakan dan mengamati sembilan peluru iluminasi ditembakkan dari selatan *Blue Line* di sekitar Hula (Sektor Timur). Lalu pada 3 April, UNIFIL mengamati IDF menembakkan empat peluru iluminasi, yang mendarat di utara *Blue Line*. UNIFIL juga menemukan bekas peluru di sekitar utara *Blue Line*, serta lubang di pagar teknis Israel. Pada 6 April, UNIFIL mengamati personel LAF melintasi selatan *Blue Line* di sekitar Mays al-Jabal sambil memantau aktivitas pelatihan IDF. Pada 7 April dan 3 Juni, UNIFIL mengadakan pertemuan tripartit dalam format terbatas, karena pembatasan COVID-19. UNIFIL secara teratur melakukan kontak dengan kedua belah pihak selama saat-saat ketegangan tinggi, seperti disebutkan di atas, mendesak pengekangan maksimum di kedua belah pihak dan menyerukan kerja sama penuh para pihak dengan UNIFIL untuk mencegah eskalasi.

Sepanjang periode dari 13 hingga 19 Mei, Kepala Misi dan Komandan Pasukan UNIFIL terus melakukan kontak dengan LAF dan IDF untuk mengklarifikasi situasi, memfasilitasi tanggapan operasional yang terkoordinasi dan mencegah eskalasi. Para pihak menegaskan kembali komitmen mereka untuk penghentian permusuhan dan bekerja sama dengan UNIFIL untuk mengatasi situasi tersebut. Dari 14 hingga 25 Mei, UNIFIL mengamati bentrokan besar terkait eskalasi konflik di Palestina. UNIFIL dan LAF bersiaga di semua lokasi demonstrasi. Atas situasi tersebut, pada periode ini UNIFIL terus bersiaga dan tetap memastikan tidak adanya pelanggaran dan korban jiwa pada demonstrasi

tersebut. Tanggal 7 hingga 11 Juni, UNIFIL telah menyelenggarakan 233 sesi pelatihan dengan LAF, termasuk latihan menembak besar-besaran dalam upaya peningkatan proporsi operasi UNIFIL yang dilakukan dalam koordinasi erat dengan LAF yang saat ini masih berada pada angka 16 persen.

c. Pelanggaran yang terjadi di area operasi

Pada tanggal 1 Maret, UNIFIL mengamati adanya penembakan 11 peluru iluminasi dari selatan *Blue Line* di sekitar Arab al-Wazzani, 7 di antaranya mendarat di utara *Blue Line*. Lalu Pada 29 Maret, media Lebanon melaporkan bahwa seorang gembala telah menemukan drone Israel di utara *Blue Line* dekat Kfar Shuba dan menyerahkannya kepada Angkatan Bersenjata Lebanon. Pada 27 April, IDFmentweet bahwa mereka telah “menjatuhkan drone Hizbullah yang menyeberang dari Lebanon ke Israel”. IDFmemberi tahu UNIFIL bahwa mereka telah menemukan "drone Hizbullah" lain yang telah mereka jatuhkan beberapa minggu sebelumnya. Pada tanggal 13 Mei, personel UNIFIL yang beroperasi di dekat Qulaylah dan di markas besar UNIFIL di Naqurah (keduanya Sektor Barat) mendengar empat suara keras yang disusul dengan penembakan roket dan melihat adanya dua kilatan cahaya di langit. IDF mengkonfirmasi kepada UNIFIL bahwa beberapa roket yang ditembakkan dari Lebanon telah mendarat di perairan Israel. UNIFIL mengunjungi situs peluncuran yang dicurigai di utara *Blue Line* pada 19 Mei.

Bentrokan yang terjadi di perbatasan Israel dan Lebanon selatan yang dipicu oleh eskalasi situasi konflik di Palestina, diawali oleh adanya tujuh orang warga sipil yang

memotong pagar teknis Israel dan menyeberang ke daerah Metulla, di mana mereka mengibarkan bendera Palestina dan Hizbullah, melemparkan batu dan menyalakan api unggun. UNIFIL kemudian menyaksikan IDF menembakkan 10 tembakan tunggal dari senapan serbu diikuti dengan tembakan peringatan, untuk menekan para demonstran untuk kembali ke utara *Blue Line* dan menjauhi pos IDF. Pada insiden tersebut UNIFIL mendesak IDF untuk menghentikan tembakan tersebut dan mengizinkan LAF bekerja sama dengan UNIFIL untuk mengevakuasi warga sipil dari daerah tersebut. Dalam surat yang sama tertanggal 17 Mei yang ditujukan kepada Presiden Dewan Keamanan (A/75/890-S/2021/482), Wakil Tetap Lebanon menyatakan bahwa “pada 14 Mei 2021, terjadi demonstrasi dilakukan oleh warga sipil Lebanon yang merupakan bentuk solidaritas kepada orang-orang Palestina di dekat pagar teknis IDF di daerah Ibil al-Qamh di kota Sarda, tentara musuh Israel melepaskan tembakan ke arah mereka ke wilayah Lebanon. Hal itu menyebabkan luka-luka pada beberapa warga sipil diantaranya Bernama Husain Sulub dan Muhammad Tahhan, dan Pak Tahhan meninggal karena mengalami luka fatal tidak lama kemudian.

LAF menunjukkan kepada UNIFIL jejak empat roket yang ditembakkan ke arah barat daya menuju Israel dan memberi tahu UNIFIL bahwa mereka telah menemukan satu roket yang belum diluncurkan, meskipun roket itu dan sisa landasan peluncuran yang digunakan telah dipindahkan oleh LAF dan tidak dapat diperiksa oleh UNIFIL. Pada 17 Mei, UNIFIL mendeteksi enam roket yang ditembakkan dari utara *Blue Line* dekat Kfar Shuba (Sektor Timur), yang terbang di

atas desa Metulla dan Misgav Am di Israel dan menghantam desa Rabb al Thalathin dan Markaba di Lebanon, serta dekat posisi UNIFIL dekat Udaysah (semua Sektor Timur). UNIFIL mengamati IDF menembakkan 12 peluru artileri, termasuk lima peluru iluminasi, dari selatan *Blue Line* menuju barat laut Shab'a (Sektor Timur). Pada 19 Mei, UNIFIL, bersama LAF, mengunjungi lokasi peluncuran yang dicurigai, di mana LAF menunjukkan UNIFIL enam landasan peluncuran untuk roket 122-mm dengan perangkat pengatur waktu dan baterai, serta satu roket utuh yang akan diluncurkan ke Israel. Pada tanggal 23 Mei, pengunjuk rasa di Shab'a menerobos barisan Angkatan Bersenjata Lebanon, maju melewati penjaga perdamaian UNIFIL dan menyeberang ke selatan *Blue Line* ke pagar keamanan Israel, di mana mereka menempatkan bendera Palestina dan Hizbullah dan melemparkan bola api ke barang-barang mudah terbakar api di pihak Israel, hal itu tentu saja telah melanggar resolusi 1701 (2006). Setelah LAF mencoba menangkap mereka, para pengunjuk rasa melemparkan batu ke LAF dan UNIFIL, insiden tersebut melukai satu tentara LAF dan merusak satu kendaraan UNIFIL.

Pada periode ini dari 20 Februari hingga 18 Juni, selain pelanggaran darat yang dilakukan selama demonstrasi yang disebutkan di atas, UNIFIL mencatat 431 pelanggaran darat oleh warga sipil Lebanon yang melintasi selatan *Blue Line*, termasuk 289 pelanggaran oleh penggembala dan petani, terutama di area Peternakan Shab'a, serta 97 pelanggaran oleh warga sipil dalam perjalanan mereka ke sumur Shu'ayb dekat Blida (Sektor Timur). Pelanggaran yang terus terjadi di wilayah udara Lebanon oleh pesawat dan drone Israel tetap

menjadi perhatian yang mendalam. *Overflights* merupakan pelanggaran resolusi 1701 (2006) dan kedaulatan Lebanon yang menyebabkan kerugian bagi penduduk Lebanon. Selama periode ini, terdapat tiga kali roket ditembakkan dari Lebanon selatan dan dua kali menghantam Israel, hal itu memicu tembakan balasan pada dua kesempatan dari Israel ke wilayah Lebanon.

4.2.1.2 Periode II (Juni – Oktober)

Pada periode II tahun 2021, Dewan Keamanan terus memantau pelaksanaan mandat resolusi 1701 (2006) yang dilakukan oleh UNIFIL. PBB tetap berkomitmen untuk mendukung kepatuhan dan menghentikan pelanggaran juga menghindari eskalasi untuk mencapai tujuan bersama yaitu perdamaian di Kawasan Lebanon selatan dan implementasi penuh resolusi 1701 (2006). Terjadi krisis sosial ekonomi yang berkelanjutan dan ketidakmampuan pemerintah Lebanon untuk memberikan layanan dasar, termasuk bahan bakar dan listrik, untuk masyarakatnya dan untuk menjalankan kendali atas semua wilayah Lebanon yang melemahkan upaya implementasi resolusi 1701 (2006). Berkurangnya kapasitas LAF untuk mempertahankan operasinya di wilayah operasi UNIFIL menjadi perhatian khusus, seperti dampak krisis keuangan dan bahan bakar Lebanon. Oleh karena itu, PBB melalui Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi 2591 (2021) yang menugaskan UNIFIL membantu pemulihan situasi internal Lebanon untuk mendapatkan kembali otoritasnya secara penuh, Dewan Keamanan mengingatkan kembali paragraf 15 dari resolusi 1701 (2006), yang menyatakan bahwa pemerintah harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah, adanya penjualan atau pasokan senjata dan materi terkait kepada entitas atau individu mana pun di Lebanon selain yang diizinkan oleh Pemerintah

Lebanon atau UNIFIL. Tidak ada kemajuan signifikan terhadap gencatan senjata permanen dan penghentian permusuhan antara Lebanon dan Israel.

Wakil penasihat militer PTRI New York, Letnan Kolonel (Sus) Martua Leonardo Sitorus dalam wawancara bersama peneliti melalui zoom meeting pada 13 November 2021 bahwa,

“Terkait dengan pengiriman pasukan perdamaian di UNIFIL sebenarnya tidak jauh dari adanya konflik internal di Lebanon itu sendiri, mungkin mba sudah paham bahwa konflik yang ada di Lebanon itu bukan disebabkan oleh permasalahan kemarin sore. Dan resolusi 1701 (2006) juga bukan satu-satunya resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan untuk menangani konflik di Lebanon. Sebuah misi perdamaian tidak akan dikirimkan apabila negara yang dituju tidak meminta Dewan Keamanan untuk hadir di negaranya. Dan penanganan konflik melalui mandat resolusi 1701 merupakan topik yang menarik karena resolusi tersebut telah di keluarkan sejak tahun 2006, namun hingga saat ini pasukan perdamaian masih bersiaga di wilayah Lebanon dengan setiap tahunnya diberi resolusi tambahan untuk menugaskan pasukan perdamaian berbagai negara bergabung dengan UNIFIL.

...

Menurut informasi yang saya miliki, pada tahun 2021 ini situasi yang terjadi di Lebanon lebih banyak mencuat mengenai permasalahan internal negaranya seperti masalah politik dan ekonomi, bisa di bilang pemerintahan Lebanon sedang mundur beberapa Langkah khususnya sejak adanya ledakan di Pelabuhan Beirut tahun 2020 dan COVID-19. Khususnya terkait dengan sistem ekonomi yang di terapkan Lebanon, mereka menerapkan sistem Ponzi. Sistem ponzi itu seperti sistemnya MLM mba, jadi dia meminjam uang ke negara lain, IMF dan sebagainya untuk memutar roda ekonomi negaranya.

...

Krisis Ekonomi yang sekarang sedang di alami oleh Lebanon, uang yang berasal dari hutang ke luar negeri malah banyak dipake korupsi, akhirnya lama-lama collapse juga terutama

saat COVID-19 ini Lebanon semakin tidak bisa memutarakan perekonomian dia yang mayoritas datang dari pariwisata. Jadinya meskipun kelihatannya mereka adem ayem dan jarang terjadi konflik terbuka, sehingga kehadiran UNIFIL itu sangat membantu Lebanon. Tugas pasukan penjaga perdamaian bukan cuma sekedar jagain orang ribut, tapi juga adanya rekonstruksi ekonomi, sosial dan politik di wilayah operasi. Dengan adanya pasukan UNIFIL minimalnya ada 10.000 orang setiap tahun, dan gak terpengaruh sama COVID-19 mereka tetap datang ke Lebanon karena diberi tugas mulia oleh masing-masing negaranya “menjaga perdamaian dunia” apa rela itu Lebanon ngelepasin gitu aja salah satu sumber pendapatan ekonomi negaranya? Tentu tidak.

...

Terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Israel dan Hizbullah, pada dasarnya mereka memiliki agenda nya masing-masing seperti Israel ingin menciptakan Israel raya yang mencakup sebagian wilayah Lebanon selatan. Begitupun dengan Hizbullah terus berupaya “melawan” Israel yang mengusik negaranya, terlepas dari bagaimana cara yang dilakukan oleh masing-masing aktor, keduanya pasti merasa bahwa apa yang dilakukan oleh pihaknya adalah hal yang benar. Yang membuat eksistensi Hizbullah yang dikenal memiliki latar belakang “kelompok bersenjata” tetap bertahan di Lebanon saat ini ialah karena mereka telah melakukan *shifting image*. Hizbullah telah menjadi sebuah partai politik di Lebanon dan memiliki masa yang mayoritas, artinya keberadaan Hizbullah dapat dianggap sebagai keterwakilan sebagian warga negara Lebanon khususnya penduduk Lebanon selatan yang mayoritas beragama islam syiah. Sebagai partai politik yang memiliki suara di pemerintahan, udah menjadi rahasia umum apabila Hizbullah sedikit banyaknya menyisipkan kepentingan mereka dalam kebijakan politik Lebanon. Meskipun LAF merupakan satu satunya Angkatan bersenjata di Lebanon yang diakui negara, namun sudah tidak asing bahwa orang-orang mengetahui kekuatan kelompok bersenjata yang dimiliki Hizbullah melebihi dari kemampuan LAF melindungi warga negaranya. Selain itu juga, Hizbullah terus mengakui secara terbuka bahwa mereka mempertahankan kemampuan militer. Oleh karena itu tidaklah heran apabila sampai saat ini meskipun tidak ada perang terbuka di Lebanon selatan, akan tetapi UNIFIL masih dibutuhkan untuk mendampingi LAF sampai waktu yang masih belum dapat kita pastikan. Mungkin

sekarang semua adem ayem karena kebagian jatah roti yang sama, tapi kalau besok-besok ada yang engga kebagian? Itu lain cerita.”

Selain itu menurut penuturan dari Komandan Kontingen Garuda UNIFIL 2021, Kol. Inf Amril Haris Siregar, dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti melalui zoom meeting pada 21 Desember 2021 menambahkan bahwa,

“Kendala utama dari implementasi penuh mandat 1701 (2006) ini lebih ke perilaku dari para pihak yaitu Israel dan Hizbullah, khususnya anggota Hizbullah yang saat ini sulit dibedakan dengan warga sipil Lebanon. Pelanggaran masih banyak ditemukan termasuk adanya insiden yang terjadi kontingen pasukan dari negara lain yang mengalami penolakan dari warga setempat saat melakukan patroli di area operasinya. Tapi tidak sampai ada aksi kekerasan, paling seperti jalanan untuk mobil patroli lewat itu di halangi kendaraan mereka atau pake batu-batu besar. Akan tetapi dari pasukan itu juga tidak bisa melakukan apa-apa karena yang menghadang itu pake pakaian warga sipil biasa, jadi pasukan UNIFIL nya tetap menghargai mereka. Hanya saja kalau pasukan UNIFIL nya kekeh lewat mereka diikuti atau di hadang langsung dan kalau udah gitu dari UNIFIL biasa menghubungi LAF untuk patroli bersama. Kebanyakan yang mengalami insiden-insiden itu sih pasukan UNIFIL dari negara-negara barat, mungkin dianggap cenderung berpihak kepada Israel.”

Penuturan yang diberikan oleh Letkol. Leonardo Sitorus dan Kolonel. Amril Siregar dalam wawancara dengan peneliti didukung oleh dokumen resmi yang dirilis oleh Dewan Keamanan mengenai pelaporan Sekertaris Jenderal nomor S/2021/953 tentang *Implementation of Security Council resolution 1701 (2006) during the period from 19 June 2021 to 25 October 2021*. Dari dokumen tersebut peneliti membagi data pelaporan menjadi tiga sub bagian, diantaranya sebagai berikut :

a. Situasi di daerah operasi

Selama periode pelaporan, Lebanon mengalami kekurangan bahan bakar dan listrik yang semakin parah.

Listrik yang disediakan negara dikurangi menjadi satu hingga dua jam per hari, dengan pemadaman nasional beberapa kali. Dan terjadi distorsi pasar gelap serta penimbunan dan penyelundupan bahan bakar, menyebabkan ada gangguan terhadap layanan-layanan penting, termasuk rumah sakit, fasilitas distribusi air, dan antrian panjang di stasiun bahan bakar. Dari 27 hingga 29 Agustus, terjadi perselisihan di sebuah pompa bensin yang bereskalasi menjadi bentrokan antara penduduk desa Maghdushah yang mayoritas beragama Kristen dan desa tetangga Anqun yang mayoritas penduduknya Syiah di Lebanon selatan. LAF, yang dikerahkan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut, menangkap 19 orang dan membuka penyelidikan. Di Lebanon timur dan utara, beberapa perselisihan pribadi meningkat menjadi penembakan, yang mengakibatkan 25 kematian dan 193 luka-luka. Setidaknya tujuh perselisihan semacam itu melibatkan penggunaan granat berpeluncur roket (*RPG*). Presiden Aoun, Perdana Menteri Mikati, Hizbullah dan Amal kemudian menyerukan ketenangan, menolak penggunaan senjata dan mendesak penghormatan terhadap aturan hukum dan lembaga-lembaganya. Pada tanggal 22 September, Komunitas Internasional mengeluarkan pernyataan yang mendesak “para pemimpin Lebanon untuk bergerak cepat untuk meringankan beban kesulitan sosial ekonomi pada rakyat Lebanon dan memulihkan layanan dasar” dan “untuk mempersiapkan pemilihan yang adil dan transparan yang akan berlangsung di waktu pada tahun 2022”.

Pada tanggal 4 Agustus, Prancis dan PBB bersama-sama memimpin sebuah konferensi untuk mendukung penduduk Lebanon, di mana para donor internasional menjanjikan \$370 juta untuk mendanai ketahanan pangan, air

dan sanitasi yang mendesak, serta kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Dalam kesimpulan bersama, peserta konferensi menyatakan bahwa "bantuan ekonomi dan keuangan struktural akan membutuhkan perubahan besar yang diharapkan dari para pemimpin Lebanon". Menurut Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Barat, kemiskinan multidimensi di Lebanon meningkat hampir dua kali lipat, dari 42 persen pada 2019 menjadi 82 persen pada 2021. Krisis sosial ekonomi multifaset, yang diperburuk oleh krisis bahan bakar yang semakin dalam, berdampak buruk pada semua sektor, mulai dari perawatan kesehatan, hingga pendidikan, hingga ketahanan pangan, hingga air dan sanitasi, dengan dampak khusus pada perempuan dan kelompok terpinggirkan. Pada tanggal 17 September, Kementerian Keuangan mengkonfirmasi bahwa Lebanon menerima \$1,139 miliar dari alokasi hak penarikan khusus IMF. Pada tanggal 30 September, dana yang tersedia untuk Kerangka Reformasi, Pemulihan dan Rekonstruksi Lebanon mencapai \$32,8 juta dari \$426,3 juta yang dibutuhkan (7,7 persen).

Pada 30 September, bantuan ke Lebanon yang dilaporkan oleh para donor mencapai \$1,66 miliar, termasuk \$1,23 miliar yang dicairkan pada tahun 2021 dan \$430 juta yang terbawa dari tahun 2020. Para donor melaporkan \$534 juta dalam komitmen kewajiban (*outstanding commitments*) untuk 2021 dan \$382 juta dalam komitmen untuk 2022 dan seterusnya. Rencana Tanggap Krisis Lebanon (*The Lebanon Crisis Response Plan*) untuk tahun 2021 didanai 24 persen, senilai \$645,5 juta, dengan badan-badan PBB dan organisasi non-pemerintah melaporkan \$287,8 juta dana yang diterima pada tahun 2021 dan \$357,7 juta dibawa dari tahun 2020. 25

Oktober, nilai tukar tidak resmi adalah 20.500 pound Lebanon per dolar, sedangkan nilai tukar resmi pemerintah tetap pada 1.507. Para pemimpin politik negara didesak untuk memungkinkan berfungsinya lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif secara efisien tanpa campur tangan dan dengan menghormati supremasi hukum, dan memprioritaskan persiapan teknis pemilihan umum yang akan diadakan pada tahun 2022.

b. Peran UNIFIL di Area Operasi

Pada periode ini, UNIFIL terdiri dari 10.351 personel militer, termasuk 678 wanita (6,5 persen), dari 46 negara penyumbang pasukan; 240 staf sipil internasional, termasuk 91 wanita (37,92 persen); dan 555 staf sipil nasional, termasuk 151 perempuan (27,21 persen). Berdasarkan resolusi 2591 (2021), UNIFIL mempertahankan tempo operasional yang tinggi dan kehadiran yang terlihat di seluruh wilayah operasi, melakukan rata-rata 14.345 kegiatan operasional militer bulanan, termasuk 6.273 patroli. Patroli kendaraan, pejalan kaki dan udara UNIFIL mempertahankan jejak operasional di kotamadya dan desa-desa di area operasi. UNIFIL melakukan rata-rata 160 pelatihan bulanan untuk angkatan darat dengan LAF. Karena keterbatasan sumber daya LAF, jumlah operasi UNIFIL yang dilakukan dalam koordinasi erat dengan LAF menurun menjadi rata-rata 14,7 persen, dibandingkan dengan rata-rata 16 persen selama periode pelaporan sebelumnya. Oleh karena itu UNIFIL meningkatkan jumlah kegiatan operasional independennya. Salah satunya UNIFIL membersihkan 12.190 meter persegi tanah di area operasi, menemukan dan membuang 1.612 ranjau anti-personil. Selain itu UNIFIL mengadakan proyek-proyek berdampak cepat, donasi dan

inisiatif penjangkauan, terus membantu otoritas lokal, termasuk melalui pengembangan kapasitas personel Pertahanan Sipil. UNIFIL terus berhubungan dengan LAF dan IDF untuk mengklarifikasi situasi, memfasilitasi tanggapan operasional yang terkoordinasi dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Para pihak bekerja sama dengan UNIFIL untuk mengatasi situasi tersebut. UNIFIL telah meluncurkan investigasi teknis atas insiden 20 Juli dan 4, 5 dan 6 Agustus.

Selama periode pelaporan, UNIFIL terus mengamati peluru penerangan yang ditembakkan oleh IDF sebagai tanggapan atas apa yang disebut terakhir sebagai kegiatan yang mencurigakan. Pada tujuh kesempatan, putaran iluminasi menghantam utara *Blue Line* dekat Yarun, Marun al-Ra dan Majidiye (semua Sektor Barat) dan Sarda, dan, pada tiga kesempatan, dekat Ghajar (Sektor Timur). Selain itu, UNIFIL mengamati sekitar 80 peluru artileri yang menghantam dekat Sarda, Khiyam, Shab'a (semua Sektor Timur) dan Naqurah, termasuk area Wadi Hamul. UNIFIL mengamati sekitar 80 peluru artileri yang menghantam dekat Sarda, Khiyam, Shab'a (semua Sektor Timur) dan Naqurah, termasuk area Wadi Hamul. UNIFIL juga mendeteksi sekitar 55 peluru artileri yang ditembakkan dari selatan *Blue Line*, menghantam dekat Kfar Shuba dan Bastrah (Sektor Timur), menyebabkan kebakaran hutan. UNIFIL mendeteksi pesawat tempur Israel di wilayah udara Lebanon sekitar waktu itu. Pada 9 Oktober, sesuai permintaan LAF untuk berkoordinasi dengan IDF, UNIFIL dikerahkan ke Blida, Mays al-Jabal dan Aytarun (Sektor Barat) untuk memfasilitasi penyeberangan petani Lebanon dari *Blue Line* untuk tujuan panen. Pada 11 Oktober, UNIFIL mengamati tujuh tentara LAF yang tidak bersenjata melintasi *Blue Line* sehubungan dengan panen zaitun di Blida.

UNIFIL juga mengamati pekerjaan untuk rekonstruksi menara di situs *Green Without Borders* di Ramiyah dan Ayta al-Sha'b (keduanya Sektor Barat) yang telah dihancurkan oleh IDF pada 25 Agustus 2020.

UNIFIL juga meluncurkan lima proyek berdampak cepat yang mempromosikan produksi pangan dan akses ke air bersih. Melalui inisiatif kerja sama sipil-militer, misi tersebut mendistribusikan peralatan pelindung dan medis untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan meningkatkan kapasitas dalam produksi energi alternatif dan pengolahan limbah. UNIFIL terus mendukung pelaksanaan resolusi 1325 (2000) tentang perempuan dan perdamaian dan keamanan, termasuk melalui pelatihan pengarusutamaan gender bagi 2.336 personel militer dan sipil UNIFIL, termasuk 129 perempuan, selama periode pelaporan. Sesuai dengan paragraf 11 dari resolusi 2591 (2021), UNIFIL membentuk sebuah komite untuk membahas dengan LAF terkait persyaratan mereka dalam hal bahan bakar, makanan, obat-obatan dan dukungan logistik untuk LAF agar tetap bisa mempertahankan kapasitas operasional kritis dalam kerangka kerja sama kegiatan dengan UNIFIL. UNIFIL dan LAF sedang mempersiapkan kesepakatan yang mengatur modalitas dan cakupan dukungan, dan mekanisme pemantauan untuk memastikan kepatuhan yang ketat terhadap kebijakan uji tuntas hak asasi manusia. UNIFIL mengadakan pertemuan tripartit pada tanggal 5 Agustus dan 7 Oktober. Melalui forum ini dan kontak rutin dengan kedua belah pihak selama saat-saat ketegangan meningkat, sebagaimana disebutkan di atas, Kepala Misi dan Komandan Pasukan UNIFIL mendesak pengekangan maksimum di kedua belah pihak dan menjajaki

langkah-langkah pencegahan, termasuk langkah-langkah untuk meningkatkan tanggapan terkoordinasi untuk mengatasi insiden dan melestarikan atau memulihkan penghentian permusuhan.

Sesuai dengan komitmen *Action for Peacekeeping* untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian, UNIFIL terus-menerus meninjau rencana keamanannya dan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi risiko dalam koordinasi yang erat dengan otoritas Lebanon. Tindakan keamanan yang ketat tetap diberlakukan di wilayah Arqub (Sektor Timur), termasuk penggunaan pengawalan bersenjata untuk pergerakan resmi oleh semua personel PBB. UNIFIL memfasilitasi 24 misi ke wilayah Arqub oleh anggota tim negara PBB. UNIFIL juga menyelesaikan peningkatan dan peningkatan infrastruktur perlindungan di 21 posisinya. Berdasarkan perkembangan dalam proses penandaan *The Blue Line* yang dibuat pada Desember 2020 dan Juni 2021 (lihat S/2021/650, paragraf 24), UNIFIL meluncurkan kampanye kedua proyek pemeliharaan barel *The Blue Line* pada 16 Agustus. Pada 25 Oktober, 64 barel telah diperbaharui. Pada periode ini UNIFIL belum mendapatkan akses penuh ke beberapa situs penting, termasuk sejumlah situs *Green without Borders*, meskipun permintaan resmi berulang kali diberikan kepada LAF sehubungan dengan penyelidikan dan sebagai bagian dari pemantauan harian misi *Blue Line*, sebagaimana diamanatkan dalam resolusi 1701 (2006) dan diingat dalam resolusi 2591 (2021).

c. Pelanggaran di Area Operasi

Pada tanggal 20 Juli, UNIFIL mendeteksi dua roket yang diluncurkan dari barat laut Qulay'ah (Sektor Barat) menuju Israel, diikuti oleh tujuh peluru artileri 155 milimeter (mm) yang ditembakkan dari selatan *Blue Line* menuju area timur laut Naqurah (Sektor Barat). Tak lama kemudian, IDF mengkonfirmasi kepada UNIFIL bahwa dua roket telah diluncurkan dari Lebanon, salah satunya telah dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome, sementara yang kedua jatuh di area terbuka di dalam Israel, dan bahwa IDF membalas dengan tembakan artileri ke arah Lebanon. Kemudian pada hari yang sama, UNIFIL, dengan Angkatan Bersenjata Lebanon, mengunjungi lokasi peluncuran yang dicurigai di barat laut Qulay'ah, di mana Angkatan Bersenjata Lebanon menunjukkan UNIFIL satu roket utuh. Pada tanggal 23 Juli, UNIFIL mengamati lima orang yang dilengkapi dengan peralatan penglihatan malam melintasi selatan *Blue Line* dekat Marun al-Ra, memanjat pagar teknis Israel, kemudian kembali ke utara Jalur Biru beberapa menit kemudian. UNIFIL juga mencatat tentara IDF menyeberang ke utara Jalur Biru dekat Kfar Shuba (Sektor Timur) pada 16 September saat mengejar ternak yang telah melintasi selatan *Blue Line*. Insiden yang paling serius terjadi pada tanggal 30 Juli di Bint Jubayl (Sektor Barat), ketika beberapa orang menyita senjata dan amunisi dari patroli UNIFIL, dan pada tanggal 24 Oktober, ketika sekelompok orang merusak dua kendaraan UNIFIL di sekitar Kunin (Sektor Barat) dan mengambil beberapa item, sementara seorang penjaga perdamaian menderita luka ringan. UNIFIL telah meminta Angkatan Bersenjata Lebanon untuk memulihkan barang-barang tersebut dan membawa para pelakunya ke pengadilan.

Pada tanggal 4 Agustus, UNIFIL mendeteksi dua roket yang diluncurkan dari Jarmaq (utara wilayah operasi UNIFIL) menuju Israel. Tak lama kemudian, IDF mengkonfirmasi kepada UNIFIL bahwa tiga roket telah ditembakkan dari Lebanon, dengan dua dari mereka berdampak dekat dengan pusat perbelanjaan Qiryat Shemona di Israel, dan itu IDF menanggapi dengan tembakan artileri ke beberapa daerah di Lebanon. Awal tanggal 5 Agustus, personel UNIFIL di Marjayoun (Sektor Timur) mendengar dua ledakan. Tak lama kemudian, IDF mengkonfirmasi kepada UNIFIL bahwa mereka telah melakukan serangan udara yang menargetkan tiga wilayah di Lebanon Selatan di sekitar kamp pengungsi Palestina di Rashidiye, selatan Tirus (Sektor Barat), Ibil al-Saqi (Sektor Timur) dan Mahmudiyah (di luar wilayah operasi UNIFIL). Pada 6 Agustus, UNIFIL mendeteksi roket yang ditembakkan dari Hasbaya (utara wilayah operasi UNIFIL) menuju Golan yang diduduki Israel. Tak lama kemudian, IDF memberi tahu UNIFIL bahwa 19 roket telah ditembakkan dari Lebanon ke Israel, 10 di antaranya dicegat oleh Iron Dome, 6 jatuh di area terbuka di Israel dan 3 jatuh di Lebanon, dan bahwa IDF telah membalas dengan tembakan artileri ke beberapa daerah di Lebanon.

Insiden kekerasan dilaporkan di kamp-kamp pengungsi Palestina di seluruh Lebanon. Di kamp Beddawi, dekat Tripoli, Lebanon utara, seorang wanita Suriah dan seorang gadis Palestina berusia 13 tahun tewas masing-masing pada tanggal 3 dan 17 Juli, menyusul perselisihan pribadi yang meningkat menjadi penembakan. Di Ein el Hilweh, dekat Sidon, Lebanon selatan, satu orang tewas pada 27 Agustus setelah bentrokan bersenjata. Pada 13 September dan 24 Oktober, UNIFIL mengamati seorang

tentara IDF melemparkan granat kilat ke arah warga sipil yang mendekati *Blue Line* di sekitar Hula (Sektor Timur). UNIFIL juga mengamati IDF menembak ke udara dekat Hula, Blida dan Mays al-Jabal (semua Sektor Timur), tampaknya untuk menghalangi warga sipil mendekati *Blue Line*. IDF terus memasuki wilayah udara Lebanon yang melanggar resolusi 1701 (2006) dan kedaulatan Lebanon. Pelanggaran lanjutan wilayah udara Lebanon oleh pesawat Israel, termasuk diduga melakukan serangan di dalam Republik Arab Suriah, serta pesawat terbang rendah dan kendaraan udara tak berawak, tetap menjadi perhatian yang mendalam. Overflights merupakan pelanggaran resolusi 1701 (2006) dan kedaulatan Lebanon dan menyebabkan kesusahan bagi penduduk Lebanon. Pelanggaran itu menyebabkan kepanikan di kalangan warga sipil Lebanon, dan merupakan ancaman langsung dan serius bagi lalu lintas sipil Lebanon dan keselamatan penerbangan sipil, karena pesawat Israel melanggar wilayah udara yang berdekatan dengan bandara Beirut dan beroperasi tepat di sebelah jalur udara sipil.

Pada tanggal 24 Oktober, sekelompok 17 hingga 20 orang berpakaian sipil menghentikan patroli UNIFIL, yang terdiri dari dua kendaraan kulit lunak, di sekitar Kunin (Sektor Barat) dengan menempatkan beberapa kendaraan di seberang jalan. Massa mengepung kendaraan, menuntut pasukan penjaga perdamaian menyerahkan perangkat elektronik mereka, termasuk kamera dan Global Positioning System (GPS). Saat patroli menolak, massa merusak kendaraan, termasuk kaca depan, tiang bendera, ban, kaca spion, dan plat nomor. Sekitar 30 menit kemudian, beberapa personel Angkatan Bersenjata Lebanon tiba, setelah itu massa membubarkan diri. Kendaraan PBB yang rusak

ditemukan oleh UNIFIL, dan pasukan penjaga perdamaian kembali ke Bint Jubayl (Sektor Barat). UNIFIL telah meluncurkan sebuah penyelidikan atas insiden tersebut. Kedudukan wilayah oleh IDF di Ghajar utara dan daerah yang berdekatan di utara *Blue Line* merupakan pelanggaran berkelanjutan terhadap resolusi 1701 (2006) dan harus dihentikan. Kepemilikan senjata ilegal yang diakui sendiri secara terus-menerus di luar kendali Negara oleh Hizbullah dan kelompok bersenjata non-Negara lainnya yang melintasi perbatasan Lebanon dengan Republik Arab Suriah merupakan pelanggaran berat yang terus-menerus terhadap resolusi 1701 (2006).

Ketegangan yang meningkat terus berlanjut di wilayah operasi UNIFIL, khususnya di sepanjang *Blue Line*. Dari 19 Juni hingga 25 Oktober, UNIFIL mencatat 318 pelanggaran darat oleh warga sipil Lebanon yang melintasi selatan *Blue Line*, termasuk 237 pelanggaran oleh para penggembala dan petani, terutama di area Peternakan Shab'a, dan 45 pelanggaran oleh warga sipil dalam perjalanan mereka ke sumur Shu 'ayb dekat Blida. Peningkatan yang mencolok dalam aksi ofensif ini menimbulkan risiko yang signifikan terhadap penghentian permusuhan dan menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk menangani ketentuan-ketentuan resolusi 1701 (2006) . Kepemilikan senjata yang tidak sah pada kesempatan ini jelas merupakan pelanggaran terhadap resolusi 1701 (2006). Dewan keamanan mengulangi menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati komitmen mereka untuk sepenuhnya menerapkan resolusi 1701 (2006), untuk menghentikan pelanggaran ini dan untuk menghormati penghentian permusuhan.

4.2.2 Penerapan Misi Pemeliharaan Perdamaian oleh Kontingen Garuda XXIII-O UNIFIL

Pada tahun 2020, Indonesia mengirimkan pasukan pemeliharaan perdamaian sebanyak 1.090 untuk bertugas pada misi pemeliharaan perdamaian dan bergabung dengan UNIFIL. Tahun ini merupakan kali ke lima belas bagi Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian ke wilayah Lebanon. Setelah pada tahun sebelumnya Kontingen yang bertugas ialah Kontingen Garuda XXIII-M UNIFIL, maka yang ditugaskan pada tahun 2021 ialah Kontingen Garuda XXIII-O UNIFIL. Kontingen tersebut terdiri dari beberapa satuan tugas diantaranya Satgas Military Police Unit (MPU) TNI, Konga XXV-M/UNIFIL, Satgas Force Headquarters Support Unit (FHQSU) TNI Konga XXVI-M1 UNIFIL, Satgas Force Protection Company (FPC) TNI Konga XXVI-M2/UNIFIL, Satgas Level II Hospital TNI Konga XXIX-L/UNIFIL, Satgas Military Community Outreach Unit (MCOU) TNI Konga XXX-K/UNIFIL dan Satgas CIMIC XXXI-K/UNIFIL (TNI P. , 2020). Pengiriman pasukan perdamaian tersebut berada dibawah payung hukum yaitu Peraturan Presiden No. 86 tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian yang didukung oleh Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke empat dan Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian (huruf b) untuk meningkatkan partisipasi Pemerintah Republik Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian, diperlukan kesiapan personel, materiil, peralatan, dan dana guna memenuhi permintaan partisipasi tersebut secara cepat dan tepat. Setiap tahunnya Indonesia telah mampu meningkatkan partisipasinya dengan sangat aktif dalam misi pemeliharaan perdamaian ini, bahkan per 31 Desember 2021, kontingen garuda merupakan *troops contributing countries* terbanyak dalam misi UNIFIL yaitu berjumlah 1228 prajurit dari total 10,048 peacekeepers. Pengiriman kontingen garuda yang terdiri dari

beberapa satuan tugas sangat memudahkan kontingen Garuda untuk berperan aktif dalam misi UNIFIL. Tidak hanya mengirimkan prajurit taktis, kontingen Garuda juga telah mampu memberikan berbagai pelayanan kepada warga lokal Lebanon dalam rangka pemenuhan implementasi dari resolusi 1701 (2006) yang terkait dengan resolusi konflik diantaranya *peacekeeping, peacemaking dan peacebuilding*.

Hal itu sejalan dengan pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tahun 2022, pada 6 Januari 2022 Menlu. Retno Marsudi (Marsudi, 2022) menyampaikan beberapa hal dan salah satunya ialah mengenai *peacekeeping mission*. Beliau mengatakan bahwa,

“Partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian terus meningkat dan hingga saat ini, lebih dari 2.800 personel Indonesia bertugas tersebar di 8 misi perdamaian PBB. Saat ini Indonesia merupakan negara penyumbang pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, terbesar ke-7 di dunia, setelah dalam tiga tahun terakhir berada di peringkat ke-8. Indonesia juga akan menyelenggarakan berbagai pelatihan dan program peningkatan kapasitas *peacekeepers*, baik yang diselenggarakan oleh PMPP TNI maupun skema UN Triangular Partnership Project (TPP).”

Kontingen Garuda XXIII-O UNIFIL atau yang disebut dengan Indobatt (*Indonesia Battalion*), tersebar di dua tugas operasi yaitu di sektor timur di UNP 7-1 yang berfokus kepada tugas penanganan wilayah operasi dan di UNIFIL Headquarter Naqoura untuk membantu penanganan pangkalan markas UNIFIL. Meski demikian pada dasarnya seluruh kegiatan penjagaan yang dilakukan oleh kontingen Garuda XXIII-O UNIFIL baik yang berada di UNIFIL HQ maupun yang berada di sektor timur tetap berada dibawah payung komando PBB dan Dewan Keamanan serta mandat resolusi 1701 (2006). Oleh karena itu segala peran dan fungsi yang dilakukan oleh kontingen Garuda tidak dapat dilepaskan dari *code of conduct* yang sesuai dengan standar PBB. Pada awal penugasan kontingen Garuda XXIII-O di area operasi, pada 23 Januari 2021 Komandan Sektor Timur UNIFIL, Brigadier General Javier Miragaya Prieto dari Spanyol

melakukan kunjungan pertama ke wilayah penugasan Kompi-Kompi yang merupakan Area of Responsibility (AoR) Indobatt dan meninjau Markas Satgas Batalyon Mekanis TNI Kontingen Garuda XXIII-O/UNIFIL di UNP 7-1, Lebanon yang berada di bawah kepemimpinannya.

Pada 30 Januari 2021, Kontingen Garuda XXIII-O/UNIFIL juga melaksanakan kegiatan *Familiarization Helipatrol / Patroli Udara di Area of Responsibility (AoR)*. Menggunakan helikopter MI-8 dengan didampingi para perwira dari masing-masing kompi bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran batas wilayah udara sekaligus mengamati daerah rawan terjadinya gesekan antara pihak yang bertikai. Saat sedang melaksanakan patrol rutin di *Blue Line*, personel Satgas Indobatt XXIII-O/UNIFIL mendeteksi adanya eskalasi konflik yang terjadi dan untungnya kontingen garuda berhasil meredam ketegangan antar kedua Angkatan Bersenjata negara tersebut. Saat sedang melaksanakan tugas rutin penjagaan dan pemantauan di sekitar *Blue Line* satgas Garuda juga menemukan sebuah mortir aktif yang memiliki daya ledak tinggi dengan status *Unexploded Ordnance (UXO)*, yang diduga merupakan sisa konflik pada tahun 2006, di *Area of Responsibility (AoR)* Kompi Alfa UNP 9-63. Dan padapukul 14.00 LT tim patroli melaksanakan pembersihan di BP-34, di koordinat Indobatt in utm 736167 3680309.

Peristiwa itu dibenarkan oleh Komandan Kontingen Garuda XXIII-O UNIFIL Kol. Amril Haris Isya Siregar dalam wawancara langsung dengan peneliti pada 12 Desember 2021 beliau mengatakan bahwa,

“Terkait peristiwa ini, saya terjun langsung memantau situasi yang terjadi di TP 35 dan TP 36 Lebanon Selatan, pada 10 Maret 2021. Eskalasi ini diawali dengan adanya pembuatan jalan baru oleh LAF di Temporary Point (TP) area 35. Pembuatan jalan tersebut dilakukan karena masih banyaknya ranjau di wilayah perbatasan Lebanon, dan LAF berusaha untuk menyingkirkan ranjau tersebut agar tidak memakan korban. Peristiwa itu mengundang respon dari IDF dengan mengirim tiga unit tank Merkava beserta beberapa prajurit yang berjalan kaki di samping kanan dan kiri tank dan

membuka Iron Gate dekat TP 35. Hal itu direspon kembali oleh LAF dengan mendatangkan 20 orang tentara LAF bersenjata lengkap dan menempatkan penembak jitu di atap sebuah rumah kecil di area TP 35. Atas kejadian tersebut, Satgas kontingen garuda XXIII-O/UNIFIL yang tengah berjaga di TP 35 dan TP 36 melaporkan kepada komando atas dan langsung direspon oleh markas UNIFIL dengan melakukan pengiriman 47 personel Battalion Mobile Reseved (BMR) Indobatt untuk mendirikan blokade di TP 35 dan TP 36 serta untuk mencegah adanya bentrok diantara kedua Angkatan bersejata dan menghindari meningkatnya eskalasi kedua belah pihak di wilayah tersebut di mana terdapat banyak warga sipil yang berada di area tersebut.

...

Merespon situasi pandemic COVID-19 yang tengah terjadi di seluruh dunia termasuk pada area operasi UNIFIL, kami membuka klinik gigi, memberikan donasi berupa handsanitizer, masker, obat-obatan dan kalender kepada masyarakat desa binaan di wilayah Tulin dan Desa Deir Seriane yang merupakan AoR (Area of Responsibility) Indobatt, Lebanon Selatan. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu pemerintah setempat dalam rangka menghentikan penyebaran COVID-19 dan bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan kesehatan, dikarenakan keterbatasan sarana medis yang ada di desa tersebut. Pengobatan gratis ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian serta sumbangsih kontingen garuda XXIII-O/UNIFIL terhadap masyarakat sekitar.

...

Selain itu, melalui Satgas *Military Community Outreach Unit* (MCOU) melakukan kunjungan ke Panti Asuhan Assosiasi Almabarat, Desa Jwayya, sektor barat Lebanon, dengan tujuan untuk memberikan bantuan kepada anak-anak panti asuhan berupa perlengkapan sekolah. Kami juga mengunjungi sekolah berkebutuhan khusus Mosan *Center School* yang berada di Tyre, Sektor barat Lebanon, pada 25 Oktober 2021. Kegiatan kunjungan ke sekolah atau School Engagement ini baru dilakukan kembali setelah hampir dua tahun ditiadakan karena dampak pandemi COVID-19, di mana semua sekolah di wilayah Lebanon Selatan ditutup dan hanya melaksanakan kelas online. Lalu kami juga berkunjung ke Sekolah Dasar Gandhuriyah Public School, di Sektor timur Lebanon tepatnya di wilayah daerah operasi Satgas Indonesia Battalion (Indobatt). Para siswa sangat senang dan terhibur dengan adanya kegiatan ini. kegiatan ini merupakan salah satu tugas misi kontingen garuda untuk memberikan sosialisasi dan informasi kepada siswa di sekolah-sekolah tentang peran serta UNIFIL di area misi Lebanon khususnya

wilayah selatan. Termasuk penjelasan tentang istilah Blue Line, blue barrel, bahaya ranjau (landmines) dan unexploded ordnance (UXO). Dengan melakukan penayangan video interaktif dalam bahasa Arab dan menyediakan Language Assistant (LA) sebagai penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Arab (lokal). Kegiatan School Engagement secara terjadwal akan dilaksanakan setiap minggu dengan mendatangi sekolah-sekolah di daerah operasi UNIFIL. Dengan melakukan koordinasi bersama pihak yang berwenang seperti Mayor (setingkat Bupati/Walikota), Kepala Sekolah dan LAF. Kegiatan yang dilakukan oleh kontingen Garuda ini bertujuan agar masyarakat bisa merasakan keberadaan Satgas di sekitar mereka dan sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan dan hubungan antara masyarakat setempat dengan Kontingen Garuda di Lebanon Selatan.

...

Kami juga rutin menggelar acara pertunjukan bertajuk Seni dan Budaya Tradisional yang dihadiri oleh Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Lebanon Hajriyanto Y. Thohari, dan Komandan Sektor Timur Brig Gen Javier Miragaya, di Markas Indobatt UNP 7-1, Adshit Al Qusayr. Dan pada acara peringatan Independence Day 76 th Indonesia, yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut, Lebanon. Sebab selain bertugas menjaga perdamaian dunia, Kontingen Garuda juga sebagai duta bangsa mempunyai kewajiban untuk mengenalkan kebudayaan Indonesia kepada dunia. Kegiatan antara lain dengan menampilkan peragaan pakaian adat daerah, cinderamata dan makanan ringan khas Indonesia serta dilanjutkan penampilan kolaborasi kesenian Tari Tor-Tor, Tari Gending Sriwijaya, Tari Merak, Tari Perang, Jaranan, pencak silat dan diakhiri dengan Tari Ge Mu Fa Mire. Atas kegiatan-kegiatan tersebut, duta besar juga memberikan apresiasi kepada kami atas kerja keras dan kerja terbaik yang telah kontingen Garuda lakukan untuk Lebanon.

...

Selain itu, Satuan Tugas TNI Kontingen Garuda XXIII-O/UNIFIL juga menerima Penghargaan tertinggi dari PBB yang disampaikan lewat upacara Medal Parade menjelang akhir penugasan sebagai pasukan perdamaian. Upacara medal parade ini dipimpin langsung oleh Komandan Sektor Timur Brigjen Javier Mur Lalaguna dan didampingi Duta Besar Indonesia di Lebanon Bapak Hajriyanto Y. Thohari. Penyerahan medali diberikan secara langsung oleh Komandan Sektor Timur Brigjen Javier Mur Lalaguna kepada perwakilan para Komandan Satgas Konga UNIFIL 2021 (Satgas Indobatt, Satgas FHQSU, Satgas FPC, Satgas CIMIC, Satgas

MCOU, Satgas Level II Hospital), bertempat di lapangan Soekarno UNP 7-1, Markas Indobatt. saat itu juga Duta Besar RI untuk Lebanon menyampaikan apresiasinya atas kemampuan kontingen Garuda yang selalu memiliki cara-cara pendekatan yang sangat baik, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat,"

Penuturan yang diberikan oleh Kol. Amril Isya Siregar senada dengan yang dikatakan oleh Kol. Nurul Yakin yang merupakan Komandan Satuan Tugas FHQSU dalam wawancara bersama peneliti melalui zoom meeting pada 15 Desember 2021, Kol. Nurul Yakin mengatakan bahwa,

"Kontingen Garuda memiliki kekhasan yang sudah mandarah daging, meski kita berada dalam misi dibawah komando PBB, akan tetapi kita mampu menyisipkan budaya-budaya ketimuran kita yang sangat diterima oleh masyarakat lokal. Meskipun tidak ada perintah tertulis dari atasan yang mengharuskan kita untuk berperilaku ramah baik kepada kontingen dari negara lain maupun kepada masyarakat lokal, tapi itu terjadi begitu saja naluriah dan itu merupakan bentuk *peacebuilding*. Dengan begitu sangat memudahkan kami melakukan operasi, kami bersyukur pendahulu kami sebelumnya pun menorehkan citra yang baik sehingga sikap dan perilaku ramah itu sudah khas dimiliki kontingen Garuda.

...

Kontingen Garuda juga secara aktif terlibat dalam penjagaan dari penyelenggaraan forum tripartite yang dilaksanakan oleh UNIFIL wilayah Blue Line yang mempertemukan pihak Lebanon dan Israel.

...

Secara berkala kontingen Garuda didatangi Tim Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Contingent Owned Equipment (COE) UNIFIL yang dipimpin Vlodymyr Olekha. Kunjungan tersebut dalam rangka pelaksanaan *Operational Readiness Inspection* (ORI) atau inspeksi kesiapan operasi Satgas Indobatt. tujuan dari *Operational Readiness Inspection* ini adalah agar seluruh satuan-satuan dibawah kendali UNIFIL memiliki kesiapan operasional sesuai standar yang telah ditetapkan, baik kesiapan personel maupun materiil. Khususnya dalam hal kesiapan *Standardised Tactical Incident Reaction (STIR)* yang harus dimiliki setiap kontingen dalam menghadapi eskalasi. Pemeriksaan materiil meliputi pemeriksaan gedung berikut sanitasinya, komunikasi, peralatan kesehatan, pelayanan catering, perlengkapan kantor, pelayanan laundry maupun instalasi listrik. Materiil lainnya yang tidak luput dari pemeriksaan tim COE yaitu seluruh kendaraan baik kendaraan tempur, alat berat zeni

konstruksi, senjata, generator, serta peralatan anti huru-hara yang seluruhnya harus dalam keadaan siap operasi.”

Dalam wawancara dengan peneliti, Kol. Amril Haris Isya Siregar juga menambahkan bahwa,

“Selain mendekatkan diri dengan masyarakat lokal Lebanon, kontingen Garuda juga aktif dalam melakukan hubungan dengan kontingen dari negara lain. Salah satunya dengan mengikuti kejuaraan menembak antar kontingen dari negara lain yang tergabung dalam UNIFIL di lapangan tembak Ebel El Saki (EES) di Lebanon Selatan. Melaksanakan latihan bersama dengan tim evakuasi medis udara Perancis Aero Medical Evacuation Team (AMET) bertempat di Instalasi Level I Hospital adchit Al Qusyr Lebanon Selatan, latihan bersama tim medis UNIFIL yang diadakan di Markas Indobatt XXIII-O ini utamanya bertujuan untuk melatih kesiapsiagaan tim medis Indobatt terkait prosedur evakuasi medis yang menjadi standar internasional PBB. Selain itu, latihan gabungan ini juga untuk menjalin koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait dengan harapan tercapainya Gold Standard penanganan korban jika sewaktu-waktu tim medis dibutuhkan, Latihan bersama evakuasi medis ini memberikan gambaran mekanisme kerja dan Standard Operational Procedure (SOP) dalam setiap aktifitas maupun kejadian yang dialami personel UNIFIL di daerah penugasan.

...

Kami juga melakukan Latihan menembak yang merupakan program triwulan rutin. Kegiatan latihan menembak ini merupakan yang pertama setelah tiba di daerah misi. Seluruh personel menggunakan perlengkapan taktis seperti helm dan body vest saat latihan menembak, hal ini bertujuan untuk melatih tingkat kewaspadaan apabila situasi dan kondisi eskalasi di daerah misi berubah, latihan *Alarm Shelter* dan *Contingency Planning*, bertempat di Sudirman Camp. Lalu ada latihan Steel Storm atau "Badai Baja" yang merupakan latihan gabungan kontingen UNIFIL sektor barat maupun sektor timur, bertempat di Naqoura. Latihan tersebut melibatkan beberapa kontingen UNIFIL (Spanyol, India, Prancis, Nepal, Lebanon, Finlandia dan Italia). Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan secara kualitas dan kuantitas menembak, kesiapsiagaan operasional dan koordinasi antar kontingen UNIFIL.

...

Lalu salah satu Satgas Kontingen Garuda yaitu *Sector East Military Police Unit (SEMPU)* melaksanakan latihan menembak bersama

yang di selenggarakan oleh FNP (*French Gendarmerie*) Polisi Militer Perancis yang diwakili masing-masing oleh lima personel di lapangan Ebel El Saqi, Lebanon Selatan. Satgas ini juga melaksanakan Latihan CRC atau Pengendalian Huru Hara (PHH) yang dilaksanakan selama tiga hari 29 Juni sampai 1 Juli 2021 di area Mako Sektor Timur UNP 7-2, Lebanon Selatan. Program latihan ini mulai diaktifkan kembali setelah sempat terhenti selama satu tahun karena adanya pandemi COVID ini bertujuan selain untuk menyamakan teknik dan prosedur sesuai dengan Standar Operasional CRC terbaru juga sebagai wadah Training of Trainer (ToT) kepada seluruh satuan Polisi Militer di Sektor Timur. Selain itu juga kami kedatangan *Force Commander Reserve Colonel/W. Martin* beserta staf mengunjungi Markas Kontingen Garuda XXIII-O di UNP 7-1, dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi dan kerja sama antar kontingen yang tergabung dalam misi perdamaian UNIFIL. Kami membahas tentang Area of Responsibility (AoR) Indobatt, meninjau TOC Room, dan juga ramah tamah.”

4.3 Hasil Pengolahan Data

4.3.1 Penerapan Resolusi 1701 (2006) oleh UNIFIL tahun 2021

UNIFIL telah memperlihatkan hasil yang gemilang dalam rangka pemenuhan implementasi resolusi 1701 (2006) di wilayah operasi (Kol.Amril Siregar, Komunikasi Personal 21 Desember 2021). Kendala yang selama ini menjadi faktor penghambat proses pemenuhan implementasi mandat resolusi 1701 (2006), disebabkan oleh perilaku para pihak (Hizbullah dan Israel) yang kerap kali melakukan pelanggaran terhadap mandat resolusi 1701 (2006). Otoritas negara (Lebanon) belum secara penuh mampu menyediakan Angkatan bersenjata yang dapat mengendalikan situasi di area operasi (wilayah Lebanon) khususnya terkait pelanggaran yang terjadi di wilayahnya. Pelaksanaan penerapan mandat resolusi 1701 (2006) yang dilakukan oleh UNIFIL dan para pihak pada situasi area operasi, peran UNIFIL di area operasi dan pelanggaran yang terjadi di area operasi untuk mengukur dampak dan hasil dari penerapan resolusi 1701, di antaranya :

a. Situasi di Area Operasi

Situasi di area operasi UNIFIL, khususnya di sepanjang *Blue Line*, tetap tegang, yang disebabkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak dan diperparah dengan perkembangan situasi di Israel dan Wilayah Pendudukan Palestina dan mengakibatkan terjadinya demonstrasi di sepanjang *Blue Line*. Kekosongan pemerintahan sejak belum disetujuinya pembentukan pemerintahan baru yang berlangsung hampir satu tahun memperburuk situasi politik Lebanon. Situasi internal yang terjadi di Lebanon menjadi kendala dari upaya penerapan penuh resolusi 1701 (2006) yang dilakukan oleh UNIFIL. Sehingga tidak ada kemajuan yang signifikan dan LAF pun masih belum mampu menyelesaikan permasalahan sehubungan dengan perlucutan kelompok-kelompok bersenjata, terkait kepemilikan senjata yang berada di luar kendali Negara oleh Hizbullah dan kelompok lain yang melanggar resolusi 1701 (2006). Hal itu membatasi kemampuan Negara untuk menjalankan kedaulatan dan otoritas penuh atas wilayahnya. Pada tahun 2021 ini situasi yang terjadi di Lebanon lebih banyak mencuat mengenai permasalahan internal negaranya seperti masalah politik dan ekonomi, dapat dikatakan bahwa pemerintahan Lebanon sedang mundur beberapa Langkah khususnya sejak adanya ledakan di Pelabuhan Beirut tahun 2020 dan COVID-19 (Letkol. Leonardo Sitorus, Komunikasi personal 15 November 2021).

PBB melalui Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi 2591 (2021) yang menugaskan UNIFIL membantu pemulihan situasi internal Lebanon dengan membantu menyediakan *humanitarian activity* serta membantu rekonstruksi ekonomi, sosial dan politik bagi Lebanon untuk mendapatkan kembali otoritasnya secara penuh (Kol.Nurul Yakin, Komunikasi personal 15 Desember 2021). Menurut Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Barat, kemiskinan multidimensi di Lebanon meningkat hampir dua kali lipat, dari 42 persen pada 2019 menjadi 82 persen pada 2021. Krisis sosial ekonomi multidimensi, yang diperburuk oleh krisis bahan bakar yang semakin dalam,

berdampak buruk pada semua sektor, mulai dari perawatan kesehatan, hingga pendidikan, ketahanan pangan, air dan sanitasi, dengan dampak khusus pada perempuan dan kelompok terpinggirkan. Lebanon juga mengalami kekurangan bahan bakar dan listrik yang parah hingga adanya pemadaman nasional yang terjadi beberapa kali. Hal itu disinyalir terjadi karena adanya distorsi pasar gelap yang melakukan penimbunan dan penyelundupan bahan bakar, sehingga menyebabkan gangguan dan mengundang terjadinya bentrokan antar warga yang saling berebut mendapatkan air dan bahan bakar atas kelangkaan yang terjadi.

Merespon situasi tersebut, Komunitas Internasional mendesak para pemimpin Lebanon agar bergerak cepat untuk meringankan beban kesulitan sosial ekonomi pada rakyat Lebanon. PBB, IMF, Perancis dan negara donor lainnya memberikan bantuan dana untuk mendanai ketahanan pangan, air dan sanitasi yang mendesak, serta kebutuhan kesehatan untuk menghadapi pandemi COVID-19 dan pendidikan. Saat krisis terjadi, nilai tukar 1 dolar terhadap mata uang Lebanon seharga 20.500 pound Lebanon, namun nilai tukar resmi yang dikeluarkan pemerintah ialah 1.507 pound Lebanon. Hal ini menyebabkan banyaknya penukaran uang yang dilakukan secara illegal. Para pemimpin politik negara didesak untuk segera memungkinkan berfungsinya lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif secara efisien dan dengan menghormati supremasi hukum, dan memprioritaskan persiapan teknis pemilihan umum yang akan diadakan pada tahun 2022.

b. Peran UNIFIL di Area Operasi

UNIFIL sebagai pasukan misi pemeliharaan perdamaian diberi tugas untuk membantu pemulihan konflik internal, krisis ekonomi dan pelanggaran terhadap mandat resolusi 1701 (2006) melalui paragraph 11 mandat 2591 (2021). UNIFIL membentuk sebuah komite untuk membahas dengan LAF terkait kebutuhan dalam hal bahan bakar, makanan, obat-obatan dan dukungan logistik untuk LAF agar tetap bisa mempertahankan

kapasitas operasional kritis dalam kerangka kerja sama dengan UNIFIL. Disamping itu UNIFIL terus mempertahankan tempo operasional yang tinggi dan ditunjukkan dengan kehadiran UNIFIL di seluruh area operasi. UNIFIL melakukan rata-rata pada periode I 14.022 kegiatan operasional militer bulanan, termasuk 6.555 patroli dan pada periode II 14.345 kegiatan operasional militer bulanan, termasuk 6.273 patroli.

UNIFIL telah menyelenggarakan 233 sesi pelatihan dengan LAF, termasuk latihan menembak besar-besaran dalam upaya peningkatan proporsi operasi UNIFIL yang dilakukan dalam koordinasi erat dengan LAF yang berada pada angka 16 persen namun menurun menjadi 14,7 persen pada periode kedua yang merupakan *spill over effect* dari situasi internal Lebanon yang mengharuskan LAF selalu siaga. Dari 14 hingga 25 Mei, UNIFIL mengamati bentrokan besar terkait eskalasi konflik di Palestina. UNIFIL dan LAF bersiaga di semua lokasi demonstrasi. Atas situasi tersebut, pada periode ini UNIFIL terus bersiaga dan tetap memastikan tidak adanya pelanggaran dan korban jiwa pada demonstrasi tersebut. Sesuai dengan komitmen perlindungan warga sipil, UNIFIL berinisiatif melakukan *Action for Peacekeeping* dan strategi implementasinya *Action for Peacekeeping Plus*. Melalui proyek-proyek jangka pendek, UNIFIL berinisiatif untuk mengembangkan kerjasama sipil-militer (CIMIC) yang didanai oleh negara-negara penyumbang pasukan dan anggota PBB, hal itu dilakukan untuk terus memberikan peningkatan kapasitas dukungan kepada penduduk lokal, LAF dan Pemerintah Lebanon.

Pada 7 April, 3 Juni, 5 Agustus dan 7 Oktober UNIFIL mengadakan pertemuan tripartit dalam format terbatas, karena pembatasan COVID-19. UNIFIL secara teratur melakukan kontak dengan kedua belah pihak selama saat-saat ketegangan tinggi, seperti disebutkan di atas, mendesak pengekangan maksimum di kedua belah pihak dan menyerukan kerja sama penuh para pihak dengan UNIFIL untuk mencegah eskalasi. Kepala Misi dan Komandan Pasukan UNIFIL terus melakukan *strategic dialog* dengan

LAF dan IDF untuk mengklarifikasi situasi, memfasilitasi tanggapan operasional yang terkoordinasi dan mencegah eskalasi. Para pihak menegaskan kembali komitmen mereka untuk penghentian permusuhan dan bekerja sama dengan UNIFIL untuk mengatasi situasi tersebut. UNIFIL terus berkoordinasi bersama LAF dengan membuat 16 pos pemeriksaan permanen dan 122 pos pemeriksaan sementara di sepanjang wilayah operasinya.

Selain melaksanakan mandat utamanya, secara parsial UNIFIL terus mendukung pelaksanaan resolusi 1325 (2000) tentang perempuan dan perdamaian serta keamanan. Ditunjukkan melalui pelatihan pengarusutamaan gender bagi personel militer dan sipil UNIFIL. Berdasarkan perkembangan dalam proses penandaan *The Blue Line* yang dibuat pada Desember 2020 dan Juni 2021 (lihat S/2021/650, paragraf 24), UNIFIL menyelenggarakan kampanye kedua proyek pemeliharaan barel *The Blue Line* pada 16 Agustus. Pada 25 Oktober, 64 barel telah diperbaharui. Pada periode ini UNIFIL belum mendapatkan akses penuh ke beberapa situs penting, termasuk sejumlah situs *Green without Borders*, meskipun permintaan resmi berulang kali diberikan kepada LAF sehubungan dengan penyelidikan dan sebagai bagian dari pemantauan harian misi *Blue Line*, sebagaimana diamanatkan dalam resolusi 1701 (2006) dan pemenuhan implementasi mandat resolusi terkait dengan resolusi konflik yang mencakup *peacekeeping*, *peacemaking* dan *peacebuilding*.

c. Pelanggaran di Area Operasi

Pelanggaran terhadap implementasi resolusi 1701 (2006) masih banyak ditemukan terjadi yang dilakukan oleh para pihak (Israel dan Hizbullah) termasuk adanya insiden yang terjadi kepada UNIFIL yang mengalami penolakan dari warga setempat saat melakukan patroli di area operasinya (Kol. Inf Amril Haris Siregar, komunikasi personal 21 desember 2021). Dari 20 Februari hingga 18 Juni, selain pelanggaran darat yang

dilakukan selama demonstrasi terkait eskalasi konflik di Palestina, UNIFIL mencatat 431 pelanggaran darat telah dilakukan oleh warga sipil Lebanon yang melintasi selatan *Blue Line*, termasuk 289 pelanggaran oleh penggembala dan petani, terutama di area Peternakan Shab'a, serta 97 pelanggaran oleh warga sipil dalam perjalanan mereka ke sumur Shu'ayb dekat Blida (Sektor Timur). Pelanggaran yang terus terjadi di wilayah udara Lebanon oleh pesawat dan drone Israel tetap menjadi perhatian yang mendalam. *Overflights* merupakan pelanggaran resolusi 1701 (2006) dan pelanggaran itu menyebabkan kepanikan kepada warga sipil Lebanon, dan merupakan ancaman keselamatan penerbangan sipil, karena pesawat Israel melanggar wilayah udara yang berdekatan dengan bandara Beirut dan beroperasi tepat di sebelah jalur udara sipil.

Terdapat tiga kali roket ditembakkan dari Lebanon selatan dan dua kali menghantam Israel, memicu tembakan balasan pada dua kesempatan dari Israel ke wilayah Lebanon. Ketegangan yang meningkat di wilayah operasi UNIFIL, khususnya di sepanjang *Blue Line* dari 19 Juni hingga 25 Oktober, tercatat terjadi sebanyak 318 pelanggaran darat oleh warga sipil Lebanon yang melintasi selatan *Blue Line*, termasuk 237 pelanggaran oleh para penggembala dan petani, terutama di area Peternakan Shab'a, dan 45 pelanggaran oleh warga sipil dalam perjalanan mereka ke sumur Shu'ayb dekat Blida. Pada tanggal 24 Oktober, sekelompok 17 hingga 20 orang berpakaian sipil menghentikan patroli UNIFIL, yang terdiri dari dua kendaraan kulit lunak, di sekitar Kunin (Sektor Barat) dengan menempatkan beberapa kendaraan di seberang jalan. Massa mengepung kendaraan, menuntut pasukan penjaga perdamaian menyerahkan perangkat elektronik mereka, termasuk kamera dan *Global Positioning System* (GPS), pada insiden tersebut massa merusak kendaraan, termasuk kaca depan, tiang bendera, ban, kaca spion, dan plat nomor. Sekitar 30 menit kemudian, beberapa personel Angkatan Bersenjata Lebanon tiba, setelah itu massa membubarkan diri.

Kedudukan wilayah Lebanon oleh IDF di Ghajar utara dan daerah yang berdekatan di utara *Blue Line* merupakan pelanggaran berkelanjutan terhadap resolusi 1701 (2006) dan harus dihentikan. Peningkatan yang mencolok dalam aksi ofensif ini menimbulkan risiko yang signifikan terhadap penghentian permusuhan dan menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk menangani ketentuan-ketentuan resolusi 1701 (2006). Kepemilikan senjata ilegal di wilayah Lebanon juga merupakan pelanggaran berat yang terus-menerus terjadi terhadap resolusi 1701 (2006) yang masih belum bisa dikendalikan. Dewan keamanan menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati komitmen mereka untuk sepenuhnya menerapkan resolusi 1701 (2006), untuk menghentikan pelanggaran ini dan untuk menghormati penghentian permusuhan.

4.3.2 Kontingen Garuda XXIII-O dalam misi perdamaian UNIFIL 2021

Kontingen garuda merupakan *troops contributing countries* terbanyak dalam misi UNIFIL yaitu berjumlah 1228 prajurit dari total 10,048 peacekeepers. Pengiriman kontingen garuda yang terdiri dari beberapa satuan tugas sangat memudahkan kontingen garuda untuk berperan aktif dalam misi UNIFIL. Tidak hanya mengirimkan prajurit taktis, kontingen garuda telah mampu memberikan berbagai pelayanan kepada warga lokal Lebanon dalam rangka pemenuhan implementasi dari resolusi 1701 (2006) yang terkait dengan resolusi konflik diantaranya *peacekeeping*, *peacemaking* dan *peacebuilding*. Secara rutin kontingen garuda melaksanakan patroli di seluruh area operasi, hal itu dilakukan untuk mendeteksi dan meredam adanya pelanggaran terhadap mandat resolusi 1701 (2006) dengan selalu mengutamakan *code of conduct* yang telah ditetapkan oleh Dewan Keamanan. Kontingen garuda juga secara aktif terlibat dalam penjagaan dari penyelenggaraan *forum tripartite* yang dilaksanakan oleh UNIFIL wilayah *Blue Line* yang mempertemukan pihak Lebanon dan Israel.

Pada situasi pandemi COVID-19 kontingen Garuda memberikan berbagai pelayanan Kesehatan untuk masyarakat lokal serta untuk menunjang Kesehatan prajurit dalam area operasi. Di area operasi kontingen Garuda membuka klinik gigi, memberikan donasi berupa handsanitizer, masker, obat-obatan dan kalender kepada masyarakat desa binaan di wilayah Tulin dan Desa Deir Seriane yang merupakan AoR (*Area of Responsibility*) Indobatt, Lebanon Selatan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu pemerintah setempat dalam rangka menghentikan penyebaran COVID-19 dan bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan kesehatan, dikarenakan keterbatasan sarana medis yang ada di desa tersebut. Pengobatan gratis ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian serta sumbangsih kontingen Garuda XXIII-O/UNIFIL terhadap masyarakat sekitar (Kol. Amril Isya Siregar, komunikasi personal 12 Desember 2021).

Selain menjalankan tugas utamanya, kontingen Garuda aktif melaksanakan *capacity building* dengan penduduk lokal dengan mengunjungi panti asuhan dan sekolah-sekolah yang berada di area operasi kontingen Garuda. Dalam kegiatan ini kontingen Garuda memberikan sosialisasi dan informasi kepada siswa di sekolah-sekolah tentang peran serta UNIFIL di area misi Lebanon khususnya wilayah selatan. Termasuk penjelasan tentang istilah *blue line*, *blue barrel*, bahaya ranjau (*landmines*) dan *unexploded ordnance* (UXO). Kegiatan yang dilakukan oleh kontingen Garuda ini bertujuan agar masyarakat dapat membiasakan keberadaan Satgas di sekitar mereka dan sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan dan hubungan antara masyarakat setempat dengan Kontingen Garuda di Lebanon Selatan. Pada area operasi Kontingen Garuda juga bertindak sebagai duta bangsa yang mempunyai kewajiban untuk mengenalkan kebudayaan Indonesia kepada dunia. Kegiatan yang dilakukan oleh kontingen Garuda dalam hal ini ialah

menampilkan peragaan pakaian adat daerah, cinderamata dan makanan ringan khas Indonesia serta dilanjutkan penampilan kolaborasi kesenian

Kontingen garuda aktif dalam melakukan hubungan dengan kontingen dari negara lain. Salah satunya dengan mengikuti kejuaraan menembak yang diikuti oleh kontingen dari negara lain dan juga melaksanakan berbagai macam Latihan gabungan untuk melatih tingkat kewaspadaan apabila situasi dan kondisi eskalasi di daerah misi meningkat. Seperti Latihan evakuasi medis, *Alarm Shelter*, *Contingency Planning*, *steel storm*, menembak dan pengendalian huru hara. Program latihan ini mulai diaktifkan kembali setelah sempat terhenti selama satu tahun karena adanya pandemi COVID-19 ini bertujuan selain untuk menyamakan teknik dan prosedur sesuai dengan Standar Operasional dan untuk meningkatkan kemampuan secara kualitas dan kuantitas, kesiapsiagaan operasional dan koordinasi antar kontingen UNIFIL.

Menjelang akhir penugasan sebagai pasukan perdamaian Satuan Tugas TNI Kontingen Garuda XXIII-O/UNIFIL juga menerima Penghargaan tertinggi dari PBB yang disampaikan lewat upacara Medal Parade oleh Komandan Sektor Timur Brigjen Javier Mur Lalaguna dan didampingi Duta Besar Indonesia di Lebanon Bapak Hajriyanto Y. Thohari (Kol. Amril Isya Siregar, komunikasi personal 12 Desember 2021). Kontingen garuda memiliki kekhasan yang sudah mandarah daging, meski kita berada dalam misi dibawah komando PBB, akan tetapi kita mampu menyisipkan budaya-budaya ketimuran kita yang sangat diterima oleh masyarakat lokal (Kol.Nurul Yakin, 15 Desember 2021). Saat ini Indonesia merupakan negara penyumbang pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, terbesar ke-7 di dunia, setelah dalam tiga tahun terakhir berada di peringkat ke-8 (Marsudi, 2022). Peningkatan jumlah pasukan kontingen garuda merupakan bentuk profesionalisme yang dapat ditunjukkan oleh Indonesia pada setiap misi pemeliharaan perdamaian. Kepercayaan yang dimiliki oleh komunitas internasional kepada Indonesia merupakan sebuah keuntungan

bagi Indonesia sebab hal tersebut dapat meningkatkan *bargaining power* Indonesia di level global.

4.4 Interpretasi Data

4.4.1 Penerapan Resolusi 1701 (2006) oleh UNIFIL 2021

Pelaksanaan mandat resolusi 1701 (2006) yang dilakukan oleh UNIFIL merupakan tanggung jawab yang diberikan oleh PBB melalui Dewan Keamanan sebagai sebuah resolusi konflik dalam rangka menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. Dalam hal ini peranan yang dilakukan oleh PBB untuk menangani permasalahan yang menjadi concern negara-negara anggotanya yaitu dengan melakukan upaya resolusi konflik. Teori resolusi konflik milik Johan Galtung (2014) digunakan sebagai salah satu bagian dari pendekatan *transcend* dengan melakukan analisa melalui pelaksanaan *peacekeeping*, *peacemaking* dan *peacebuilding* dalam menciptakan perdamaian di daerah-daerah konflik (Johan Galtung, 2014). Pelaksanaan resolusi konflik yang dilakukan oleh UNIFIL berpedoman kepada mandat 1701 (2006), yang terdiri dari :

- a. Memantau penghentian permusuhan;
- b. Mendampingi dan mendukung Angkatan Bersenjata Lebanon saat mereka ditempatkan di seluruh selatan Lebanon, termasuk di sepanjang *Blue Line*, saat Israel menarik militernya dari Lebanon;
- c. Mengkoordinasikan kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam paragraf sebelumnya (di atas) dengan Pemerintah Lebanon dan Israel;
- d. Memperluas bantuannya untuk memastikan akses kemanusiaan ke penduduk sipil dan pemulangan orang-orang yang dipindahkan secara sukarela dan aman;
- e. Membantu Angkatan Bersenjata Lebanon dalam pembentukan antara *Blue Line* dan Sungai Litani suatu wilayah yang bebas dari

personel bersenjata, aset, dan senjata apa pun kecuali milik Pemerintah Lebanon dan UNIFIL;

- f. Membantu Pemerintah Lebanon, atas permintaannya, dalam mengamankan perbatasannya dan titik masuk lainnya untuk mencegah masuknya senjata atau benda lain yang terkait secara ilegal ke Lebanon.

Dewan keamanan memberikan wewenang kepada UNIFIL untuk mengambil berbagai tindakan yang diperlukan di area operasi yang sesuai dengan kemampuannya, untuk memastikan tidak adanya aktivitas permusuhan dalam bentuk apa pun di area operasi. UNIFIL juga harus menghentikan upaya-upaya yang mencegah UNIFIL menjalankan mandat operasi di bawah mandat Dewan Keamanan. Selain itu, UNIFIL juga bertanggung jawab untuk melindungi personel, fasilitas, instalasi dan peralatan PBB, memastikan keamanan dan kebebasan bergerak personel PBB, bantuan kemanusiaan dan, tanpa mengurangi tanggung jawab utama Pemerintah Lebanon, yaitu membantu melindungi warga sipil di bawah ancaman kekerasan fisik yang mungkin terjadi (UNIFIL, UNIFIL Presskit, 2019).

Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan melalui pendekatan *ongoing evaluation* menurut Wollman (2007) yang bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan, terhadap proses implementasi kebijakan agar dapat dipergunakan untuk memperbaiki, revisi, meluruskan kembali proses implelementasi kebijakan ke arah yang sesungguhnya ingin dicapai (Wollman, 2007). Peneliti menemukan bahwa UNIFIL telah memenuhi tugas dan fungsinya sebagai pasukan pemeliharaan perdamaian sesuai dengan mandat resolusi 1701 (2006) diantaranya memantau penghentian permusuhan; membantu dan mendampingi LAF untuk mendapatkan otoritas secara penuh; menjaga seluruh area operasi termasuk *Blue Line* dari seluruh kegiatan kelompok bersenjata selain LAF; membantu LAF dan pemerintah Lebanon untuk mendukung aktifitas

bantuan kemanusiaan; berkoordinasi dengan para pihak dengan menyelenggarakan forum tripartite yang mempertemukan para pihak untuk menghindari ketegangan di area operasi; dan membantu pemerintah Lebanon untuk mengamankan perbatasannya untuk mencegah masuknya senjata atau benda lain secara ilegal ke Lebanon.

Dalam laporan Sekretaris Jenderal tentang implementasi resolusi 1701 (2006) tahun 2021, terdapat 749 pelanggaran darat telah dilakukan oleh warga sipil Lebanon yang melintasi selatan *Blue Line*, termasuk 526 pelanggaran oleh penggembala dan petani, dan pelanggaran udara yang dilakukan oleh Israel ke wilayah udara Lebanon yang merupakan pelanggaran resolusi 1701 (2006) yang menyebabkan kepanikan kepada warga sipil Lebanon, dan merupakan ancaman keselamatan penerbangan sipil, karena pelanggaran udara yang dilakukan Israel berdekatan dengan bandara Beirut dan beroperasi tepat di sebelah jalur udara sipil (PBB, 2021). Selain itu, adanya kepemilikan senjata ilegal di wilayah Lebanon yang juga merupakan pelanggaran berat yang terus-menerus terjadi terhadap resolusi 1701 (2006) yang masih belum bisa dikendalikan. Disamping upaya yang selama ini dilakukan, UNIFIL belum mendapatkan akses penuh dari otoritas terkait ke beberapa situs penting, termasuk sejumlah situs *Green without Borders*. Padahal permintaan resmi berulang kali diberikan kepada LAF sehubungan dengan penyelidikan dan sebagai bagian dari pemantauan harian misi *Blue Line*, sebagaimana diamanatkan dalam resolusi 1701 (2006). Dalam laporan, sekretaris jenderal menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati komitmen mereka untuk sepenuhnya menerapkan resolusi 1701 (2006), untuk menghentikan pelanggaran ini dan untuk menghormati penghentian permusuhan.

4.4.2 Kontingen Garuda XXIII-O dalam misi perdamaian UNIFIL 2021

Menurut Soon Ang dan Linn Van Dyne, Kecerdasan budaya ialah kemampuan individu dalam memahami, berpikir dan berperilaku secara

efektif dalam situasi-situasi yang terdapat perbedaan antar budaya (Ang, 2008). Dalam konteks misi pemeliharaan perdamaian, kecerdasan budaya yang memberikan pengetahuan mengenai preferensi perbedaan budaya yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat dipelajari dan digunakan baik sebelum maupun saat berinteraksi dengan budaya lain untuk membantu menentukan model dalam berinteraksi dengan budaya tersebut. Seperti yang sering dialami oleh pasukan UNIFIL yang berasal dari negara lain, saat melakukan patroli menggunakan mobil patroli UNIFIL di halangi kendaraan, atau diberhentikan oleh penduduk lokal menggunakan batu-batu besar. Bahkan pada beberapa insiden penduduk lokal ada yang sampai mengambil barang-barang atau peralatan patroli yang dimiliki pasukan UNIFIL dan kebanyakan yang mengalami insiden-insiden pasukan UNIFIL dari negara-negara barat karena mungkin dianggap berpihak pada Israel (Kol. Amril Isya Siregar, komunikasi personal 12 Desember 2021).

Menurut Kol. Nurul Yakin penduduk lokal Lebanon yang menganut budaya ketimuran memiliki pola interaksi dan gaya komunikasi yang kurang lebih sama dengan masyarakat Indonesia (Kol. Nurul Yakin, komunikasi personal 15 Desember 2021). terlebih area operasi tempat kontingen Garuda berada di area Lebanon selatan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain berinteraksi dengan penduduk lokal Lebanon, penugasan kontingen Garuda yang berada di bawah bendera PBB dan tergabung dalam misi pemeliharaan perdamaian UNIFIL mengharuskan kontingen Garuda untuk dapat memahami pola interaksi dan komunikasi yang dimiliki oleh kontingen dari negara lain. Hal itu tidak menjadi kendala bagi kontingen Garuda sebab kontingen Garuda yang berasal dari Indonesia sudah terbiasa untuk menghadapi keberagaman suku dan budaya yang kontingen Garuda miliki di Indonesia. Sehingga kecerdasan budaya yang dimiliki oleh kontingen Garuda sangat ideal untuk menunjang tugas misi pemeliharaan perdamaian di seluruh dunia.

Bentuk kecerdasan budaya yang dimiliki oleh kontingen garuda dalam berinteraksi dengan penduduk lokal Lebanon tergambar dari pelaksanaan metode *peacekeeping operation* milik Johan Galtung yang terdiri dari *peacekeeping*, *peacemaking* dan *peacebuilding* (Johan Galtung, 2014). Pengiriman kontingen garuda oleh Indonesia merupakan pengiriman pasukan terbanyak dalam misi UNIFIL yaitu berjumlah 1228 prajurit dari total 10,048 *peacekeepers* (United Nations, 2021a). Tidak hanya mengirimkan prajurit taktis, kontingen garuda yang terdiri dari beberapa satuan tugas sangat memudahkan kontingen garuda untuk berperan aktif pada seluruh misi UNIFIL dalam rangka pemenuhan implementasi dari resolusi 1701 (2006). Secara rutin kontingen garuda melaksanakan patroli di seluruh area operasi, hal itu dilakukan untuk mendeteksi dan meredam adanya pelanggaran terhadap mandat resolusi 1701 (2006) dengan selalu mengutamakan *code of conduct* yang telah ditetapkan. Kontingen garuda secara aktif terlibat dalam penjagaan dari penyelenggaraan *forum tripartite* yang dilaksanakan oleh UNIFIL wilayah *Blue Line* yang mempertemukan pihak Lebanon dan Israel

Pada situasi pandemi COVID-19 kontingen garuda memberikan berbagai pelayanan Kesehatan untuk masyarakat lokal serta untuk menunjang Kesehatan prajurit dalam area operasi. Seperti membuka klinik gigi, memberikan donasi berupa handsanitizer, masker, obat-obatan dan kalender kepada masyarakat desa binaan di wilayah Tulin dan Desa Deir Seriane yang merupakan AoR (*Area of Responsibility*) Indobatt, Lebanon Selatan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu pemerintah setempat dalam rangka menghentikan penyebaran COVID-19 dan bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan kesehatan, dikarenakan keterbatasan sarana medis yang ada di desa tersebut. Pengobatan gratis ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian serta sumbangsih kontingen garuda XXIII-O/UNIFIL terhadap masyarakat sekitar (Kol. Amril Isya Siregar, komunikasi personal 12 Desember 2021).

Kontingen garuda aktif melaksanakan *capacity building* dengan penduduk lokal dengan mengunjungi panti asuhan dan sekolah-sekolah yang berada di area operasi kontingen garuda. Dalam kegiatan ini kontingen garuda memberikan sosialisasi dan informasi kepada siswa di sekolah-sekolah tentang peran serta UNIFIL di area misi Lebanon khususnya wilayah selatan. Termasuk penjelasan tentang istilah *blue line*, *blue barrel*, bahaya ranjau (*landmines*) dan *unexploded ordnance* (UXO). Kegiatan yang dilakukan oleh kontingen garuda ini bertujuan agar masyarakat dapat membiasakan keberadaan satgas di sekitar mereka dan sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan dan hubungan antara masyarakat setempat dengan Kontingen Garuda di Lebanon Selatan. Pada area operasi Kontingen Garuda juga bertindak sebagai duta bangsa yang mempunyai kewajiban untuk mengenalkan kebudayaan Indonesia kepada dunia. Kegiatan yang dilakukan oleh kontingen garuda dalam hal ini ialah menampilkan peragaan pakaian adat daerah, cinderamata dan makanan ringan khas Indonesia serta dilanjutkan penampilan kolaborasi kesenian.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas prajurit dan meningkatkan hubungan dengan kontingen antar kontingen. Kontingen garuda mengikuti kejuaraan menembak yang diikuti oleh kontingen dari negara lain dan juga melaksanakan berbagai macam Latihan gabungan untuk melatih tingkat kewaspadaan apabila situasi dan kondisi eskalasi di daerah misi meningkat. Seperti Latihan evakuasi medis, *Alarm Shelter*, *Contingency Planning*, *steel storm*, menembak dan pengendalian huru hara. Program latihan ini mulai diaktifkan kembali setelah sempat terhenti selama satu tahun karena adanya pandemi COVID-19 ini bertujuan selain untuk menyamakan teknik dan prosedur sesuai dengan Standar Operasional dan untuk meningkatkan kemampuan secara kualitas dan kuantitas, kesiapsiagaan operasional dan koordinasi antar kontingen UNIFIL.

Inisiatif dan pelaksanaan misi pemeliharaan perdamaian dalam rangka pemenuhan mandat resolusi 1701 (2006), membawa satuan tugas

TNI Kontingen Garuda XXIII-O/UNIFIL menerima Penghargaan tertinggi dari PBB yang disampaikan lewat upacara *Medal Parade* oleh Komandan Sektor Timur Brigjen Javier Mur Laguna dan didampingi Duta Besar Indonesia di Lebanon Bapak Hajriyanto Y. Thohari (Kol. Amril Isya Siregar, komunikasi personal 12 Desember 2021). Kontingen Garuda memiliki kekhasan yang sudah mandarah daging, meski kita berada dalam misi dibawah komando PBB, akan tetapi kita mampu menyisipkan budaya-budaya ketimuran kita yang sangat diterima oleh masyarakat lokal (Kol.Nurul Yakin, 15 Desember 2021).

Peran aktif yang dilakukan oleh kontingen Garuda tidak lepas dari kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, dan sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Saat ini Indonesia merupakan negara penyumbang pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, terbesar ke-7 di dunia, setelah dalam tiga tahun terakhir berada di peringkat ke-8 (Marsudi, 2022).

4.5 Pembahasan

4.5.1 Penerapan resolusi 1701 DK PBB oleh UNIFIL tahun 2021 di Lebanon

Resolusi konflik merupakan sebuah tindakan pemecahan masalah bersama *solve a problem together* (Deutsch Morton, 2006). *Solve problem together* yang dimaksudkan oleh Waeitzman merujuk kepada pendekatan neoliberal institusional dan konsep *resolusi konflik* yang memiliki pengertian beberapa atau semua negara menggabungkan kekuatan dalam sebuah institusi (PBB) untuk melawan atau mencegah permasalahan global serta mencegah suatu negara agar tidak dapat menggunakan kekuatannya untuk meraih keuntungannya sendiri yang merugikan negara lain.

Simon Fisher memaknai resolusi konflik merupakan usaha menangani sebab –sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru (Simon Fisher, dkk, 2001). Upaya penanganan sebab-sebab konflik dan rekonsiliasi hubungan pihak yang berseteru tersebut tidak terlepas dari teori peranan organisasi internasional Clive Archer (1983) yang menjelaskan tentang peran organisasi internasional sebagai instrument, wadah dan aktor dalam menangani permasalahan yang menjadi *concern* negara-negara anggota (Archer, 2006).

Operasi perdamaian atau misi pemeliharaan perdamaian merupakan norma yang disepakati oleh komunitas internasional dalam kerangka konstruktivisme yang mengatur pola interaksi negara-negara di dunia (Ross, 2011). Sehingga dapat dikatakan bahwa resolusi 1701 (2006) merupakan produk dari PBB dan Dewan Keamanan untuk menangani permasalahan atau konflik yang terjadi di Lebanon khususnya Lebanon selatan antara Hizbullah dan Israel pada tahun 2006. Pada resolusi 1701 (2006), PBB melalui Dewan Keamanan membentuk pasukan perdamaian UNIFIL yang terdiri dari negara-negara anggota PBB untuk bersama-sama terlibat dalam rangka menghentikan permusuhan dan menciptakan perdamaian serta keamanan internasional melalui sebuah operasi perdamaian dengan memanfaatkan sistem integrasi pengerahan pasukan militer, polisi dan sipil dari seluruh negara anggota (United Nations, 2021c).

Dalam kerangka konseptual penanganan pada konflik yang terjadi di Lebanon selatan menugaskan operasi perdamaian atau *peacekeeping operation* merupakan bagian dari skema DDR, hal itu diberlakukan karena situasi konflik di Lebanon selatan relative masih negative yang ditandai dengan masih adanya pelanggaran dan potensi-potensi konflik yang masih kental di wilayah tersebut. DDR merupakan proses yang Panjang dan membutuhkan *political will* dari pimpinan negara tersebut. Operasi perdamaian memiliki tujuan yang dibatasi oleh sumber hukum yang berlaku, dalam hal ini Piagam PBB untuk mempertahankan kondisi gencatan senjata

dan menjaga stabilitas, agar perdamaian absolut dapat tercipta. Dalam operasi perdamaian di Lebanon ini, PBB memberikan mandat resolusi 1701 yang menugaskan UNIFIL bertugas untuk menciptakan perdamaian sesuai mandat resolusi dalam konflik Israel-Hizbullah. Di dalam resolusi 1701 (2006) (UNSC, 2006b) terdapat mandat yang harus dijalankan dan menjadi pedoman beroperasinya UNIFIL, mandat resolusi tersebut berisi :

- a. Memantau penghentian permusuhan;
- b. Mendampingi dan mendukung Angkatan Bersenjata Lebanon saat mereka ditempatkan di seluruh selatan Lebanon, termasuk di sepanjang *Blue Line*, mengawasi Israel menarik militernya dari Lebanon;
- c. Mengkoordinasikan kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam paragraf sebelumnya (di atas) dengan Pemerintah Lebanon dan Israel;
- d. Memperluas bantuannya untuk memastikan akses kemanusiaan ke penduduk sipil dan memfasilitasi pemulangan orang-orang (korban sipil) yang dipindahkan secara sukarela dan aman;
- e. Membantu Angkatan Bersenjata Lebanon dalam memastikan wilayah *Blue Line* dan Sungai Litani yang bebas dari personel bersenjata, aset, dan senjata apa pun kecuali milik Pemerintah Lebanon dan UNIFIL;
- f. Membantu Pemerintah Lebanon, atas permintaannya, dalam mengamankan perbatasannya dan titik masuk lainnya untuk mencegah masuknya senjata atau benda lain yang terkait secara ilegal ke Lebanon.

Upaya yang dilakukan oleh PBB melalui Dewan keamanan dengan memberikan penugasan (*deployment*) kepada UNIFIL untuk menghentikan permusuhan melalui mandat resolusi 1701 (2006) merupakan sebuah pola pengoperasian misi pemeliharaan perdamaian atau operasi perdamaian (*peacekeeping operation*). *Peacekeeping operation* yang dilakukan di

Lebanon merupakan suatu operasi yang melibatkan personel militer namun tanpa adanya penggunaan kekuatan daya serang, dalam kata lain *peacekeeping operation* yang dilakukan oleh UNIFIL di Lebanon mencakup *peacekeeping*, *peacemaking* dan *peacebuilding* sesuai dengan teori resolusi konflik yang dikemukakan oleh Johan Galtung (2014). Oleh karena itu terdapat tiga prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh para pihak dan UNIFIL sebagai alat untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional di Lebanon (United Nations, 2021b), diantaranya :

- a. Persetujuan para pihak, ini merupakan hal dasar yang harus menjadi pertimbangan dan komitmen para pihak agar sebuah operasi perdamaian dapat dilaksanakan secara maksimal dan tepat sasaran sesuai dengan mandat operasi.
- b. Ketidakberpihakan, pasukan perdamaian tidak boleh memihak kepada para pihak yang berkonflik, namun tidak boleh netral dalam melaksanakan mandate.
- c. Tidak menggunakan kekuatan kecuali untuk membela diri dan mempertahankan mandat resolusi, dibawah otorisasi Dewan Keamanan. Secara umum pasukan perdamaian harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka dalam melaksanakan mandat operasi untuk menjaga proses politik, melindungi kepentingan sipil yang berada dalam ancaman fisik dan membantu otoritas negara konflik untuk menegakan hukum dan keadilan.

Dari ketiga prinsip tersebut, poin pertama merujuk kepada para pihak (aktor) yang terlibat dalam permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini pihak-pihak tersebut diantaranya Lebanon (Pemerintah dan LAF) yang memiliki otoritas penuh terhadap wilayah Lebanon , Hizbullah atas kepemilikan kelompok milisi bersenjata, dan Israel (IDF) atas pendudukan wilayah Lebanon selatan. Poin kedua dan ketiga merujuk kepada UNIFIL sebagai alat dari pelaksanaan mandat resolusi 1701 (2006).

Setelah melaksanakan penelitian di lapangan, peneliti menemukan secara umum penerapan mandat resolusi 1701 (2006) yang dilakukan oleh UNIFIL sepanjang tahun 2021 telah terpenuhi dan telah sesuai dengan prinsip dasar yaitu prinsip ketidakberpihakan (*imparsial*) dan tidak menggunakan kekuatan bersenjata kecuali untuk membela diri (*self defense*) untuk mempertahankan mandat resolusi. Bahkan pada tahun 2021, atas konflik internal Lebanon yang meningkat Dewan keamanan memberikan mandat tambahan pada bulan agustus yaitu resolusi 2591 (2021) yang menugaskan UNIFIL membantu Lebanon yang saat itu mengalami krisis ekonomi dan konflik internal untuk mendapatkan kembali otoritasnya secara penuh dan membantu LAF melindungi kepentingan sipil termasuk *humanitarian activity* dan rekonstruksi politik, ekonomi yang berada dalam ancaman serta membantu otoritas negara untuk menegakan hukum dan keadilan.

Terkait dengan poin pertama (persetujuan para pihak) yang ada dalam prinsip dasar pelaksanaan *peacekeeping operation*, peneliti menemukan bahwa para pihak disini belum sepenuhnya dapat dikatakan setuju pada prinsip dasar pelaksanaan *peacekeeping operation*. Karena fakta dilapangan yang peneliti temukan dari wawancara dengan narasumber dan pengolahan data terhadap sumber resmi yang dikeluarkan oleh Sekertaris Jenderal PBB menunjukkan bahwa pemerintah Lebanon belum sepenuhnya memberikan akses kepada UNIFIL sehubungan dengan penyelidikan dan sebagai bagian dari pemantauan harian di area operasi *Blue Line*, sebagaimana diamanatkan dalam resolusi 1701 (2006) dan diingat dalam resolusi 2591 (2021) ke beberapa situs penting, termasuk sejumlah situs *Green without Borders*, meskipun permintaan resmi dari Sekertaris Jenderal berulang kali diberikan kepada pemerintah Lebanon dan LAF. Disamping itu, selama 15 tahun pendampingan yang diberikan oleh UNIFIL kepada LAF belum ada kemajuan yang dicapai terkait penghentian aktifitas kelompok milisi bersenjata (Hizbullah) dan

penyelundupan senjata ilegal yang masih terjadi di perbatasan wilayah Lebanon. Secara jelas bahwa kondisi tersebut menjadi kendala dari usaha pemenuhan penerapan resolusi 1701 (2006).

Selain perilaku yang dilakukan oleh Lebanon, dalam penelitian ini peneliti juga masih menemukan adanya aktifitas yang dilakukan IDF dan tidak mencerminkan poin pertama (persetujuan para pihak) yang ada dalam prinsip dasar pelaksanaan *peacekeeping operation*. Pada tahun 2021 peneliti menemukan bahwa Israel kerap kali melakukan pelanggaran terhadap poin kedua dari mandat resolusi 1701 (2006) dengan menduduki wilayah Ghajar utara oleh IDF yang merupakan wilayah Lebanon berdekatan utara *Blue Line* dan *overflight* di wilayah udara Lebanon oleh pesawat dan *drone* Israel yang menyebabkan kepanikan serta mengancam warga sipil Lebanon merupakan pelanggaran berkelanjutan terhadap resolusi 1701 (2006).

Adanya pendapat dari berbagai pihak tentang diperlukannya peningkatan mandat resolusi 1701 (2006) dari chapter VI (*peacekeeping*) ke chapter VII (*peace enforcement*). Peneliti melihat dari situasi yang terjadi di Lebanon selatan dan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber, bahwa untuk saat ini mandat resolusi 1701 (2006) yang merupakan mandat untuk melakukan *peacekeeping operation* di Lebanon masih relevan. Sebab sejauh ini LAF dan UNIFIL masih bisa mengendalikan situasi di area operasi, salah satunya melalui mekanisme *Standardised Tactical Incident Reaction (STIR)* yang di gunakan sebagai standar operasional UNIFIL apabila terjadi eskalasi konflik yang di wilayah operasi. Dengan kondisi saat ini, peneliti menilai bahwa Lebanon masih membutuhkan UNIFIL dan PBB untuk mengamankan wilayah dan warganya.

Apabila kita merujuk kepada pernyataan Johan Galtung (2000) tentang dua tipe perdamaian, dengan masih adanya pelanggaran yang

dilakukan oleh para pihak dan belum terpenuhinya prinsip dasar (persetujuan para pihak) maka situasi di Lebanon khususnya Lebanon selatan yang terkait dalam mandat resolusi 1701 (2006) tidak termasuk kepada tipe damai positif. Sebab *positive peace* adalah keadaan di mana tidak adanya kekerasan langsung di tingkat struktural, sedangkan *negative peace* adalah keadaan ketika kekerasan yang terjadi secara langsung sudah tidak ada lagi (Johan Galtung and Carl G. Jacobsen, 2000). Situasi damai yang ada di Lebanon selatan sepanjang tahun 2021 termasuk kepada situasi damai negatif, meskipun secara umum tidak ada konflik terbuka yang terjadi.

Analisa peneliti mengenai kerangka konseptual DDR menurut Ian Douglas, penerapan mandat resolusi 1701 di Lebanon selatan terkait proses perdamaian selama lima belas tahun sejak 2006 masih berada di tahap *Disarmament* sedangkan untuk tahap *Demobilization* dibutuhkan peran aktif dari para pihak khususnya otoritas Lebanon (pemerintah dan Angkatan bersenjata) dan Israel. Untuk itu dalam setiap laporan resmi yang dikeluarkan oleh PBB, Sekertaris Jenderal terus menerus menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati komitmen mereka untuk sepenuhnya menerapkan resolusi 1701 (2006), menghentikan pelanggaran dan untuk menghormati penghentian permusuhan.

4.5.2 Implikasi Penerapan Resolusi 1701 DK PBB terhadap Kontingen Garuda XXIII-O/UNIFIL di Lebanon

4.5.2.1 Kecerdasan Budaya Kontingen Garuda XXIII-O/UNIFIL

Kecerdasan budaya merupakan *state-like personality* atau kemampuan yang dapat dilatih dan diasah baik melalui pelatihan maupun melalui pengalaman di budaya yang beragam. Kecerdasan budaya dapat digunakan untuk mengenal, mempelajari dan beradaptasi dalam suatu komunitas baru yang memiliki perbedaan budaya sehingga hal tersebut dapat menguntungkan bagi seorang

individu atau kelompok saat memasuki pada lingkungan atau budaya baru.

Terdapat empat dimensi kecerdasan budaya yang meliputi *metacognitive*, *cognitive*, *motivational*, dan *behavioral* (Ang, 2008). Menurut Soon Ang dan Linn Van Dyne, Kecerdasan budaya ialah kemampuan individu dalam memahami, berpikir dan berperilaku secara efektif dalam situasi-situasi yang terdapat perbedaan antar budaya (Ang, 2008). Kecerdasan budaya dan strategi lintas budaya berperan positif dalam membentuk intuisi budaya melalui gaya eksperiensial. Kecerdasan budaya yang tinggi akan menunjang tingginya kemampuan untuk menerapkan strategi budaya yang tepat pada saat mengalami interaksi lintas budaya sehingga terjadi perluasan kognisi budaya (Hidayat, 2012).

Meskipun teori kecerdasan budaya menurut Soon Ang merupakan sebuah alat ukur pada metode penelitian kuantitatif, namun pada penelitian ini peneliti menggunakan teori kecerdasan budaya yang digunakan pada metode penelitian kualitatif seperti penelitian yang dilakukan oleh Ling Deng dan Paul Gibson (2008) mengenai kecerdasan budaya (CQ) sebagai komponen kunci dari kemampuan kepemimpinan lintas budaya dalam konteks perbedaan budaya Barat-Cina (Deng, 2008). Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori kecerdasan budaya untuk melihat kemampuan kontingen Garuda dalam menerapkan mandat resolusi 1701 (2006) sebagai sarana pencapaian tujuan nasional dan menciptakan keamanan nasional melalui operasi pemeliharaan perdamaian.

Kecerdasan budaya yang dimiliki oleh kontingen Garuda dalam *peacekeeping operation* di Lebanon, membuat kontingen Garuda mampu mengamati pola interaksi dan gaya komunikasi yang dimiliki oleh individu atau kelompok lain sehingga kontingen Garuda dapat menentukan perilaku *verbal* dan *non-verbal* yang sesuai saat

berinteraksi dengan penduduk lokal Lebanon maupun dengan kontingen lain, untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi dalam komunikasi dan interaksi antar budaya. Kecerdasan budaya yang dimiliki oleh kontingen Garuda tidak terlepas dari kondisi sosial budaya Indonesia yang bersifat *multiculture* sehingga memungkinkan kontingen Garuda untuk melaksanakan misi operasi dalam hal ini resolusi 1701 (2006) yang sesuai dengan mandat tanpa mengurangi nilai dan norma yang harus dijaga oleh pasukan perdamaian dalam sebuah misi pemeliharaan perdamaian. Menurut Kol Nurul Yakin, kontingen Garuda memiliki kekhasan yang sudah mandarah daging, meski kita berada dalam misi dibawah komando PBB, akan tetapi kita mampu menyisipkan budaya-budaya ketimuran kita yang sangat diterima oleh masyarakat lokal (Komunikasi Personal, 15 Desember 2021).

Kecerdasan budaya yang dimiliki oleh kontingen Garuda tidak terlepas dari kemampuan prajurit TNI yang secara individu memiliki sifat, sikap dan kemampuan yang berada di atas rata-rata. Hal itu merupakan buah dari proses seleksi ketat kontingen Garuda yang dilakukan oleh PMPP TNI sebelum dilakukan pemberangkatan. Prajurit TNI yang lolos menjadi kontingen Garuda telah memenuhi standar yang dimiliki oleh PMPP, termasuk kemampuan bina teritorial dan kepribadian yang adaptif selama prajurit bertugas di satuan sebelumnya. Kepribadian prajurit kontingen Garuda merupakan hal yang sangat fundamental, sebab prajurit merupakan ujung tombak dari kesuksesan penerapan mandat operasi untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan di wilayah operasi. Selain untuk melaksanakan mandat resolusi dibawah komando Dewan Keamanan dan PBB, prajurit atau *peacekeepers* yang bertugas harus bisa merepresentasikan negaranya di kancah internasional, begitupun dengan kontingen Garuda.

Keempat dimensi dari teori kecerdasan budaya milik Soon Ang, menjelaskan dimensi-dimensi yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Kemampuan metakognitif, kognitif, motivasi dan *behavioural* (sikap), akan menjadi sebuah satu kesatuan yang utuh dimiliki oleh kontingen garuda dalam menjalankan misinya, dalam misi pemeliharaan perdamaian pada konflik di Lebanon selatan melahirkan sebuah *behaviour* (sikap) dari kontingen garuda yang sangat diterima oleh penduduk lokal dan berimplikasi terhadap kontingen garuda dan Indonesia secara menyeluruh. Pelaksanaan *capacity building* dengan penduduk lokal dengan mengunjungi panti asuhan dan sekolah-sekolah yang berada di area operasi yang berisi kegiatan sosialisasi dan memberi informasi kepada siswa dan siswi tentang peran UNIFIL di area misi Lebanon (sektor timur), termasuk tentang istilah *blue line*, *blue barrel*, bahaya ranjau (*landmines*) dan *unexploded ordnance* (UXO) adalah *behaviour* (sikap) yang dilakukan oleh kontingen garuda terkait kecerdasan budaya yang dimilikinya.

Tidak hanya kepada penduduk lokal di area operasi, *behavior* (sikap) yang ditunjukkan oleh kontingen garuda pada misi pemeliharaan perdamaian di Lebanon selatan juga digunakan oleh kontingen garuda untuk menjalin hubungan dengan kontingen dari negara lain dengan mengikuti kejuaraan menembak yang diikuti oleh kontingen dari negara lain dan juga melaksanakan berbagai macam Latihan gabungan untuk melatih tingkat kewaspadaan apabila situasi dan kondisi eskalasi di daerah misi meningkat, termasuk Latihan evakuasi medis, *Alarm Shelter*, *Contingency Planning*, *steel storm*, menembak dan pengendalian huru hara. Di samping kecerdasan budaya yang dimiliki dan penerapan mandat resolusi 1701 (2006) yang dilakukan oleh kontingen garuda dengan tergabung dalam kontingen UNIFIL, terdapat implikasi yang berpengaruh kepada citra

Indonesia dan TNI secara umum dan kepada kontingen Garuda XXIII-O secara khusus.

5.2.2.2 Implikasi Penerapan Resolusi 1701 terhadap Kontingen Garuda

Implikasi dapat diartikan sebagai ketelibat, kaitan yang tidak dinyatakan secara eksplisit. Beberapa ahli mengartikan implikasi sebagai segala sesuatu yang dihasilkan dari adanya proses pembuatan kebijakan atau akibat yang timbul dari pelaksanaan dan penerapan kebijakan atau kegiatan tertentu (Islamy, 2003). Dalam konteks penelitian ini, penerapan kebijakan yang dimaksud ialah penerapan resolusi 1701 (2006) yang diuji sebagai objek untuk melihat keterkaitan maupun akibat dari penerapan kebijakan dalam periodisasi tertentu yaitu pada tahun 2021. Silalahi (2005) menyatakan bahwa implikasi adalah akibat yang timbul dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan yang dapat berdampak baik atau buruk terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijakan tersebut (Silalahi, 2005).

Analisa peneliti terkait implikasi penerapan resolusi 1701 terhadap kontingen Garuda sesuai dengan teori dimensi implikasi menurut Winarno salah satunya pada poin kedua, yang menyatakan bahwa kebijakan mungkin memiliki implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar tujuan kebijakan. Maka dalam hal ini kebijakan yang dimaksud oleh peneliti ialah resolusi 1701 (2006) dan keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar tujuan kebijakan yang dimaksud ialah kontingen Garuda dan Indonesia, sebab resolusi 1701 (2006) sendiri ditujukan untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan Hizbullah dan untuk menciptakan perdamaian di Lebanon, namun peneliti melihat terdapat kaitan dan dampaknya baik untuk keadaan-keadaan sekarang maupun yang akan datang

kepada kontingen Garuda dan Indonesia seperti yang dijelaskan oleh Winarno pada teori dimensi implikasi poin ketiga.

Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif terlibat dalam operasi perdamaian dilatar belakangi oleh sejalannya tujuan misi perdamaian dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pelaksanaan *peacekeeping operation* oleh TNI berada di bawah Undang-undang RI No.34 Tahun 2004 tentang TNI, melalui pasal yang menjelaskan tentang pelaksanaan operasi militer selain perang dan Keputusan Panglima Nomor Kep/4/I/2007. Penerbitan Peraturan Presiden No. 86 tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian menjadi payung hukum dari pengiriman pasukan perdamaian ke dalam *peacekeeping operation* mendukung Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Komitmen Indonesia untuk terlibat dalam misi pemeliharaan perdamaian ditunjukkan dengan dibentuknya instansi melalui Peraturan Panglima Nomor Perpang/91/XI/2011 tanggal 16 November 2011 untuk menegaskan segala aspek yang berhubungan dengan kebutuhan persiapan misi pemeliharaan perdamaian (TNI, 2013).

Dalam konteks global, kontribusi aktif dan kinerja profesional yang dilakukan oleh Indonesia khususnya dalam *peacekeeping operation* di Lebanon dapat membawa Indonesia memiliki *bargaining power* yang tinggi dalam komunitas global. Dan dalam konteks nasional keterlibatan negara dalam *peacekeeping operation* dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas individu (kontingen Garuda) dan organisasi (PMPP TNI) dengan adanya :

Transfer of technology melalui penyamarataan standar industri strategis di bidang pertahanan baik secara langsung maupun tidak langsung, hal ini terkait modernisasi kepada pasukan Indonesia khususnya *major equipment military spec* dan perkembangan industri pertahanan Indonesia secara umum; *Transfer of knowledge* melalui penyamarataan standar operasional pasukan perdamaian secara global untuk bisa terbiasa menghadapi eskalasi dan situasi konflik, untuk itu prajurit yang menjadi kontingen Garuda merupakan prajurit terbaik yang dimiliki oleh TNI sehingga mampu beradaptasi dengan baik dan menerapkan nilai-nilai yang mampu merepresentasikan bangsa Indonesia dengan baik; Termasuk adanya hal yang terkait pendanaan yang diberikan oleh PBB melalui mekanisme *reimbursement* kepada negara pengirim pasukan perdamaian.

Keterlibatan kontingen Garuda dalam *peacekeeping operation* atau disebut juga operasi pemeliharaan perdamaian (OPPD) di Lebanon merupakan sebuah operasi militer selain perang (OMSP) yang menjadi salah satu tugas pokok TNI dalam menjaga stabilitas keamanan nasional dan terpeliharanya ketahanan nasional di berbagai bidang untuk mencapai tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada penelitian ini peneliti juga menemukan implikasi (akibat atau efek) dari penerapan resolusi 1701 (2006) yang menugaskan kontingen Garuda untuk bergabung dengan UNIFIL khususnya pada tahun 2021, salah satunya dengan terpenuhinya salah satu aspek keamanan nasional yaitu keamanan ke luar yang merujuk pada

kondisi dinamis yang menjamin tegaknya kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Negara Kesatuan RI dari Ancaman luar negeri dalam rangka terciptanya Keamanan Nasional. Kuantitas kontingen Garuda XXIII-O/UNIFIL yang berjumlah 1228 personel dari total 2.800 personel kontingen Garuda yang bertugas tersebar di 8 misi perdamaian PBB, membawa Indonesia menjadi *troops contributing countries* ke-7 terbanyak setelah tiga tahun berturut-turut selalu berada di posisi ke-8. Selain itu, pada tahun 2021 kontingen Garuda merupakan kontingen dengan jumlah personel terbanyak di UNIFIL oleh karena itu kesuksesan yang dicapai oleh UNIFIL dalam melaksanakan resolusi konflik melalui mandat resolusi 1701 (2006) dan prinsip dasar *peacekeeping operation* tidak terlepas dari peran kontingen Garuda XXIII-O/UNIFIL. Profesionalisme yang telah ditunjukkan oleh kontingen Garuda dapat dijadikan indikator keberhasilan dari PMPP TNI dalam mempersiapkan, dan membentuk prajurit terbaik untuk menjadi duta bangsa.